

**ANALISA PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA PADA  
WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA  
KEBIJAKAN DANA DESA**

**SKRIPSI**

*Diajukan guna Memenuhi Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Program Studi Ekonomi Pembangunan*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh

Nama : Endita Wahyu Amieza  
NPM : 1605180034  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA MEDAN**

**2021**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, tanggal 19 Oktober 2021, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :

**MEMUTUSKAN**

Nama : ENDITA WAHYU AMIEZA  
N P M : 1605180034  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Konsentrasi : OPERASI RISET  
Judul Skripsi : ANALISA PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI  
PARIWISATA PADA WILAYAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA KEBIJAKAN DANA  
DESA  
Dinyatakan : ( B- ) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk  
memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan  
Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

**TIM PENGUJI**

**Penguji I**

**Dra.LAILAN SAFINA HSB, M.Si**

**Penguji II**

**Dra.ROSWITA HAFNI,M.Si**

**PEMBIMBING**

**DR.PRAWIDYA HARIANI,RS,SE M.Si**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

**H. JANURI, SE., MM., M.Si.**

**Sekretaris**



**Assoc. Prof. Dr. ADE GUNAWAN, SE., M.Si.**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama : ENDITA WAHYU AMIEZA

N.P.M : 1605180034

Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN

Judul Skripsi : ANALISA PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI  
PARIWISATA PADA WILAYAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA KEBIJAKAN DANA  
DESA

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian  
mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2021

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh:

Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si



H. JANURI, SE., MM., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Jl. Kapten Muhtar Basri No. 3 Medan, Telp (061) 6624-567 Kode Pos 20238

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**



Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDITA WAHYU AMIEZA  
Npm : 1605180034  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Operasi Riset Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ **Analisa Perkembangan sektor ekonomi pariwisata pada wilayah provinsi daerah istimewa Yogyakarta pasca kebijakan dana desa**” adalah bersifat asli (*original*), bukan hasil menyadur secara mutlak hasil karya orang lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Medan, September 2021  
yang menyatakan



ENDITA WAHYU AMIEZA

**ABSTRAK**  
**ANALISA PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA PADA**  
**WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA**  
**KEBIJAKAN DANA DESA**

Oleh:

Endita Wayu Amieza.

NPM. 1605180034

Berdasarkan berbagai permasalahan yang terjadi di sektor ekonomi pariwisata wilayah provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta pasca kebijakan dana desa. Dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2015-2019 jumlah pengunjung di Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan dari wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara. Peningkatan Pariwisata diharapkan mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif yang dimana bertujuan menganalisis variabel yang berhubungan dengan Analisis Perkembangan Indikator Sosial Provinsi DIY Pasca Kebijakan Dana Desa yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang akan diteliti adalah data kondisi sosial ekonomi dan dana desa yang bersumber dari website Badan pusat statistik dan Kementrian keuangan serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini ialah perkembangan sektor pariwisata di Prov Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan faktor penting dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan adanya destinasi wisata serta faktor alam dan lingkungan yang mendukung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai penunjang ekonomi serta adanya alokasi dana desa dapat membantu kegiatan masyarakat di sektor ekonomi pariwisata. Pertambahan jumlah destinasi wisata di Yogyakarta setelah adanya kebijakan alokasi dana desa, digambarkan dari bentuk kepedulian kelompok pemuda yang dinamai dengan Gerakan Pemuda Pencinta Alam (GEMPA) dalam mengelola dan mengembangkan objek wisata mulai dari tahapan perencanaan yang dilakukan bersama aparatur desa hingga pada promosi dan pengembangan objek wisata di Daerah Istimewa Yogyakarta

**Kata kunci : Masyarakat, Ekonomi, Pariwisata, dana desa,**

## KATA PENGANTAR



*Assalamua'laikum Warrahmatullah Wabarakatuh*

Puji dan syukur penulis penjatkan kepada Allah SWT atas berkat rahmat dan karunia-Nya yang tiada tara kepada kita semua dan sholawat beriring salam disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW sehingga penulis mampu menyelesaikan proposal ini yang berjudul **ANALISA PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA PADA WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA KEBIJAKAN DANA DESA** . Penulisan proposal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana (S-1) pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Selama penyusunan skripsi ini, penulis banyak memperoleh bantuan, bimbingan serta doa yang tidak henti-hentinya dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yang teristimewa kedua orang tua penulis, Ayah dan Mama, serta kakak dan adik penulis yang telah memberikan segala do'a, kasih sayang, perhatian, semangat dan pengorbanan baik secara materil dan immateril kepada penulis.
2. Bapak Dr. H. Agussani, M. AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, M.M, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Ade Gunawan, SE, M.Si selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, SE, M.Si selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E, M.Si selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Dra. Roswita Hafni, M.Si selaku Sekretaris Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Prawidya Hariani RS, S.E, M.Si selaku Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang telah memberikan arahan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan atas ilmu dan pembekalan yang diberikan kepada penulis selama melaksanakan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Seluruh Staff/Pegawai Biro Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam hal administrasi.
11. Teman-teman kelas A- Ekonomi Pembangunan yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terimakasih atas dukungan kalian semua.

Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak yang telah membaca proposal ini demi perbaikan-perbaikan kedepannya dan untuk penyempurnaan proposal ini dimasa yang akan datang sehingga proposal ini dapat menambah dan memperluas pengetahuan terutama bagi penulis dan pembaca lainnya. Akhir kata, penulis mengharapkan semoga proposal ini dapat memberikan manfaat bagi pembacanya. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas semua bantuan yang diberikan.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, Desember 2021

**ENDITA WAHYU AMIEZA**

1605180034



## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	ii
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	12
1.3 Batasan dan Rumusan Masalah.....	12
1.3.1 Batasan Masalah.....	12
1.3.2 Rumusan Masalah .....	12
1.4 Tujuan Penelitian .....	13
1.5 Manfaat Penelitian .....	13
1.5.2 Non Akademik .....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Uraian Teoritis .....	14
2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi .....	14
2.1.2 Teori Pendapatan Nasional .....	27
2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi .....	31
2.1.4 Teori Ketimpangan Ekonomi.....	40
2.2 Regulasi tentang Kebijakan Dana Desa .....	46
2.3 Penelitian Terdahulu .....	49

2.4 Kerangka Penelitian .....	50
2.4.1 Kerangka Penelitian .....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
3.1 Pendekatan Penelitian .....	51
3.2 Definisi Operasional.....	51
3.3 Tempat dan Waktu Penelitian.....	52
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	53
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	53
3.6 Objek Penelitian .....	53
3.7 Tahapan Penelitian .....	53
3.7.1 Metode Analisis Deskriptif .....	53
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>55</b>
4.1 Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.....	55
4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	55
4.1.2 Kondisi Topografi Provinsi DIY.....	57
4.1.3 Keadaan Penduduk Prov. D.I Yogyakarta .....	59
4.2 Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta .....	61
4.2.1 Indikator Sosial Yogyakarta .....	61
4.2.2 Indikator Ekonomi Provinsi DIY.....	68
4.2.3 Data Jumlah Perkembangan Dana Desa Provinsi D.I YOGYAKARTA .....	73
4.3 Pertambahan jumlah destinasi dan kunjungan wisata (orang), pada wilayah provinsi di Yogyakarta setelah kebijakan Dana Desa .....	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1 KESIMPULAN .....	79
5.2 SARAN .....	80
DAFTAR PUSTAKA .....	81

## DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas dan Tinggi Wilayah Provinsi DIY Per Kecamatan Tahun 2018 .	58
Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia D.I Yogyakarta 2019-2021 .....	62
Tabel 4.3 Persentase Penduduk Miskin Di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021 .	63
Tabel 4.4 Rata-rata lama sekolah Provinsi D.I Yogyakarta menurut kabupaten/kota menurut jenis kelamin tahun 2017 - 2019 .....	67
Tabel 4.5 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kabupaten Mandailing Natal 2018-2021 .....	68
Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha D.I. Yogyakarta (Persen).....	70
Tabel 4.7 Kondisi Ekonomi Sebelum Dan Perubahan Indeksi Harga Konsumen Prov. D.I Yogyakarta .....	72
Tabel 4.8 Data Jumlah Perkembangan Dana Desa Provinsi DIY (ribu rupiah)....	73
Tabel 4.9 Jumlah Destinasi wisata di Provinsi D.I Yogyakarta.....	75
Tabel 4.10 Jumlah Destinasi wisata di Provinsi D.I Yogyakarta 2015 - 2020 .....	77

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia .....	3
Gambar 1.2 Jumlah wisatawan mancanegara 2018 - 2020 .....	4
Gambar 1.3 Rincian Anggaran PEN Sektor Pariwisata .....	6
Gambar 1.4 Perkembangan Dana Desa 2015 – 2020 (Triliun Rupiah) .....	7
Gambar 2.1 Kurva Kuznets .....	42
Gambar 2.2 Kurva Lorenz .....	45
Gambar 2.3 Kerangka Konseptual .....	50
Gambar 4.1 Peta Yogyakarta .....	57
Gambar 4.2 Piramida Provinsi Istimewa Yogyakarta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin .....	60

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Pariwisata merupakan salah satu sektor yang diperhatikan dalam kancan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan karena sektor pariwisata diyakini dapat dijadikan sebagai salah satu sektor andalan dalam peningkatan devisa Negara. Pembangunan pariwisata pun mulai digalakkan. Potensi-potensi wisata yang ada mulai diperhatikan untuk pembangunan dan pengembangan. Pembangunan ini dimaksudkan selain untuk menambah aset pendapatan Negara untuk mendayagunakan sumber daya ada.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki beranekaragam suku dan adat istiadat yang berbeda, serta memiliki banyak sumber daya alam yang berupa keindahan pemandangan alam seperti pegunungan yang sejuk, laut yang biru, air terjun, pemandian air panas dan banyak lagi pesona alam lainnya. Sektor pariwisata ini diharapkan dapat menjadi penghasil devisa nomor satu di Indonesia. Sesuai dengan pengembangan pariwisata, terlebihnya pariwisata di Indonesia merupakan jalan keluar dari berbagai masalah perekonomian yang ada di negara ini. Dipandang dengan hal yang terjadi maka dapat diatasi dengan adanya industri pariwisata karena industri ini dapat menciptakan lapangan kerja baru yang tentunya akan dapat memberikan peluang ekonomi yang tinggi. Pariwisata di Indonesia umumnya bertujuan untuk : a) mengembangkan dan mendayagunakan sumber dan potensi kepariwisataan nasional agar menjadi kegiatan ekonomi yang dapat diandalkan; b) meningkatkan devisa Negara; c) memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha serta lapangan kerja; d)

meningkatkan laju pembangunan daerah; e) memperkenalkan dan mengembangkan nilai-nilai bangasa dan keindahan alam. Oleh karena itu perlu dilakukan pengembangan dan peningkatan kepariwisataan sehingga perlu ditata, dipelihara, dan dipromosikan untuk meningkatkan minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata.

Pariwisata Indonesia memiliki pesona tersendiri yang khas. Indonesia memiliki ribuan destinasi, baik yang sudah populer namanya maupun yang masih belum digarap optimal. Berdasarkan data *World Travel & Tourism Council* (WTTC) pada tahun 2018, pariwisata Indonesia menjadi yang tercepat tumbuh dengan menempati peringkat ke-9 di dunia, nomor tiga di Asia, dan nomor satu di kawasan Asia Tenggara. WTTC mengeluarkan laporan *Daya & Kinerja 2018 (Power & Performance Report)* versi terbarunya dengan menggunakan perhitungan dampak ekonomi tahunan dari sektor pariwisata. Laporan ini mengurutkan kinerja 185 negara selama tujuh tahun terakhir, dari 2011 hingga 2017. Pengukuran didasarkan pada empat indikator, yakni kontribusi pariwisata atas PDB, pengeluaran wisatawan mancanegara, pengeluaran wisatawan domestik, dan nilai investasi di sektor tersebut. Capaian di sektor pariwisata itu juga diakui perusahaan media di Inggris, *The Telegraph* yang mencatat Indonesia sebagai ‘*The Top 20 Fastest Growing Travel Destinations*’. Berikut ini merupakan indeks daya saing pariwisata Indonesia secara global.

**Gambar 1.1 Indeks Daya Saing Pariwisata Indonesia**



Sumber : databoks

Dari data di atas menunjukkan bahwa Indeks daya saing pariwisata Indonesia menurut *World Economy Forum* (WEF) juga menunjukkan perkembangan membanggakan, dimana peringkat Indonesia naik dari 50 pada 2015, ke peringkat 42 pada 2017. Pada 2017, pertumbuhan sektor pariwisata melaju pesat sebesar 22 %, menempati peringkat kedua setelah Vietnam (29%). Di tahun yang sama, rata-rata pertumbuhan sektor pariwisata di dunia 6,4 % dan 7 % di ASEAN. Penguatan branding “*Wonderful Indonesia*” juga terus digalakkan di mana selama periode 2016 sampai Maret 2019 berhasil mendapatkan 150 penghargaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa potensi pariwisata yang dimiliki Indonesia mampu bersaing di kancah Internasional melalui keindahan alam dan budayanya.

Sejalan dengan penghargaan dan capaian Indonesia di bidang pariwisata sebelum dihempas pandemi, tren pendapatan Indonesia dari sektor pariwisata tentunya mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sektor pariwisata menjadi industri paling babak belur akibat dihempas oleh pandemi virus corona. Dampak Covid-19 benar-benar memukul industri pariwisata dari hulu ke hilir. Tutupnya



destinasi wisata, restoran dan hotel membuat banyak orang harus dirumahkan bahkan terkena PHK. Selain itu tekanan dari pemerintah untuk membatasi pergerakan masyarakat dan anjuran untuk tetap di rumah semakin menjatuhkan industri pariwisata. Pandemi tidak hanya memukul pariwisata Indonesia, namun juga secara global. Di berbagai belahan dunia, usaha perhotelan, jasa penerbangan, angkutan darat dan laut mengalami penurunan yang tajam. Pendapatan industri pariwisata dunia pada tahun 2020 diproyeksikan menurun drastis dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Menelisik lebih jauh imbas virus corona di industri pariwisata dalam negeri, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif memprediksi pendapatan devisa dari sektor pariwisata menurun hingga 50% akibat lesunya aktivitas kepariwisataan. Salah satu penyebab anjloknya pendapatan devisa dari sektor pariwisata, disinyalir karena menurunnya jumlah pengunjung wisatawan mancanegara ke Indonesia.

**Gambar 1.2 Jumlah wisatawan mancanegara 2018 - 2020**



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

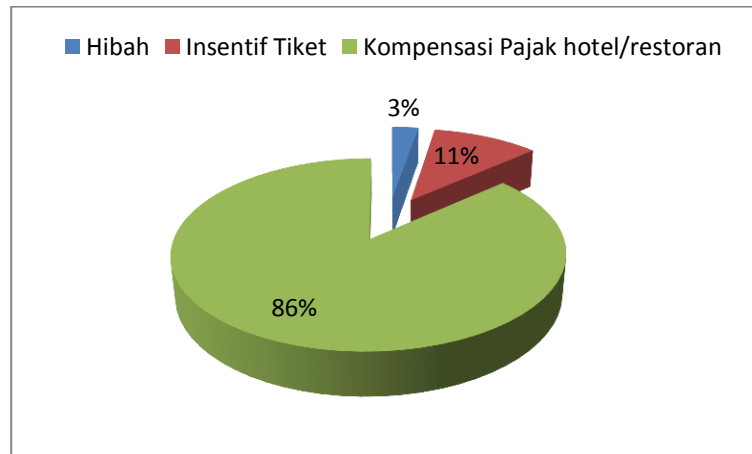
Berdasarkan data di atas, jumlah wisatawan mancanegara (wisman) yang melancong ke Indonesia mengalami penurunan drastis sejak Februari 2020 (satu bulan sebelum kasus pertama COVID-19 di Indonesia). Secara historis, jumlah

kedatangan wisman di bulan Februari umumnya mengalami penurunan sekitar 100 ribu orang dari bulan sebelumnya. Namun, pada Februari 2020 wisman turun hingga 400 ribu orang dari Januari tahun 2020. Jumlah kedatangan wisman ini tercatat turun 32% (y.o.y) dibandingkan jumlahnya pada Februari 2019 yang sebanyak 1,264 juta orang. Pada bulan awal Maret 2020, pemerintah mengumumkan kasus pertama COVID-19 di Indonesia, jumlah kedatangan wisman turun menjadi 470 ribu orang. Jumlah ini terus menurun curam hingga bulan April 2020. Jumlah kunjungan wisman pada Mei 2020 sebanyak 163,6 ribu, menurun 86,9% dari periode yang sama tahun sebelumnya yang sebanyak 1,2 juta kunjungan. Sementara jika dibandingkan April 2020, meningkat tipis sebesar 3,1% dari 158,7 ribu kunjungan. Total kunjungan dari Januari-Mei 2020 sebanyak 2,9 juta, menurun 53,36% dari tahun sebelumnya yang sebanyak 6,3 juta kunjungan. Pada Juni 2020, jumlah wisman sebanyak 160,3 ribu kunjungan. Angka ini menurun sebesar 88,8% dari Juni 2019 yang sebanyak 434,1 ribu kunjungan. Sementara dibandingkan Mei 2020 menurun 2% dari 163,6 ribu kunjungan.

Sektor industri pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan perekonomian Indonesia mengharuskan pemerintah mengatur strategi untuk membantu sektor pariwisata bangkit dari keterpurukan. Pemerintah melakukan beberapa upaya dan strategi untuk mendukung bangkitnya Industri pariwisata setelah diterjang badai Covid-19. Salah satunya yaitu dengan kebijakan pemerintah berupa Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Program Pemulihan Ekonomi Nasional merupakan salah satu rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian. Program ini bertujuan

melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya selama pandemi COVID-19.

**Gambar 1 3 Rincian Anggaran PEN Sektor Pariwisata**



Sumber : Databoks

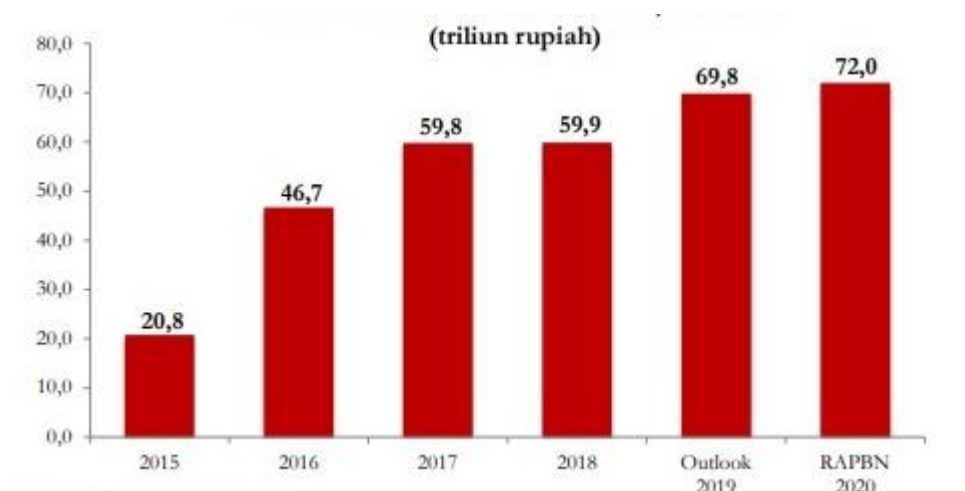
Dalam program PEN tersebut, Pemerintah akan mengalokasikan Rp 3,8 triliun untuk sektor pariwisata yang dialokasikan untuk kompensasi pajak hotel dan restoran sebesar 87% atau senilai Rp 3,3 triliun, insentif tiket ke 10 destinasi pariwisata sebesar 10% atau Rp 400 miliar, dan hibah pariwisata sebesar 3% atau sebesar Rp 100 miliar. Pemerintah juga menargetkan kinerja pariwisata Indonesia pada tahun 2020 ini. Para pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif (parekraf) didorong untuk memanfaatkan berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam upaya mitigasi dan mempercepat pulihnya perekonomian sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dari dampak pandemi COVID-19.

Pemerintah akan melakukan sejumlah strategi untuk membangkitkan pariwisata di Indonesia. Salah satunya adalah sertifikasi *cleanliness, health, safety* (CHS) di destinasi wisata untuk meningkatkan kepercayaan wisatawan. Penerapan protokol CHS dipersiapkan, dan didukung dengan acuan penerapan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan Kementerian Kesehatan kemudian diturunkan

ke panduan protokol kesehatan sektor parekraf, yang antara lain dalam bentuk buku panduan digital dan pembuatan konten kreatif bekerja sama dengan hotel, rumah makan, dan sektor ekonomi kreatif lainnya yang akan segera diluncurkan. Kemenparekraf/Baparekraf memprioritaskan untuk mendorong segmen wisatawan nusantara terlebih dahulu sebagai langkah awal pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi Covid19.

Selain itu, Dana desa merupakan salah satu alternatif dalam pengembangan industri pariwisata di Indonesia. Dana desa diberikan oleh pemerintah untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, meningkatkan kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id), 2019). Salah satu proses yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah proses perencanaan pembangunan desa. Perencanaan desa yang baik membantu kegiatan berjalan lebih terstruktur, sehingga pembangunan yang dilakukan akan memberikan dampak sosial ekonomi lebih maksimal dan akar masalah dari desa tersebut dapat terselesaikan dengan rapi dan terintegrasi.

**Gambar 1.4 Perkembangan Dana Desa 2015 – 2020 (Triliun Rupiah)**



Dalam Periode tahun 2015 – 2020, dana desa terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan mencapai 35,4% pertahunnya dari sebesar Rp. 20.766,2 miliar pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp. 69.832,1 miliar pada tahun 2019. Seiring dengan peningkatan Dana Desa dalam periode 2015 – 2019, rata-rata dana yang diterima desa juga meningkat, yaitu dari Rp. 280 juta per desa pada tahun 2015 menjadi Rp 933 juta per desa tahun 2019. Jumlah desa yang menerima Dana desa juga mengalami peningkatan dari 74.093 desa pada tahun 2015 menjadi 74.953 pada tahun 2019.

Seiring dengan peningkatan Dana Desa yang diterima oleh desa, pemerintah mendorong masyarakat untuk tidak hanya melakukan pembangunan yang monoton seperti infrastruktur fisik. Akan tetapi, pemerintah juga mendorong agar melakukan pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi yang salah satunya dengan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang termasuk dalam pengembangan desa wisata. Desa wisata merupakan suatu bentuk pariwisata, dimana sekelompok kecil wisatawan yang tinggal di dalam atau di dekat kehidupan tradisional atau di desa untuk mempelajari kehidupan desa dan lingkungan setempat (Inskeep, 1991). Pengembangan desa menjadi desa wisata patut dilakukan karena keunikan alam, budaya dan kehidupan tradisionalnya. Pengembangan desa menjadi desa wisata diharapkan agar terjadi pemerataan kesejahteraan dengan wilayah lainnya, tanpa merusak budaya yang ada di desa tersebut (Dewi, Fandeli, & Baiquni, 2013).

Pengembangan desa wisata merupakan salah satu pengembangan wisata yang dapat memperkenalkan potensi-potensi bagi suatu desa. Dalam hal ini

pengembangan desa harus mengetahui secara detail terkait karakteristik, kelebihan dan kelemahan desa tersebut, sehingga pengembangan desa wisatadapat sesuai dengan daya tarik yang akan dijual. Dalamhal ini, penduduklokal dapat ikut serta dalam pengembangan desa wisata, sehingga dapat dijadikan subjek dalam pengembangan desa.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu destinasi tujuan wisatawan lokal maupun asing yang mempunyai daya tarik tersendiri. Daerah istimewa Yogyakarta sendiri memiliki potensi yang secara umum terdiri dari aspek kebudayaan dan aspek pendidikan, hal itu terlihat dari nilai sejarah yang melekat pada daerah ini. Selain itu, daya tarik desa-desa wisata di DIY ini banyak diminati oleh wisatawan dari mancanegara yang didukung juga oleh kehidupan masyarakatnya yang sampai saat ini masih menjunjung nilai-nilai budaya yang ada dan telah diwariskan secara turun-temurun. Yogyakarta juga dikenal sebagai daerah yang sering melahirkan seniman-seniman kreatif yang memiliki karya hingga dikenal baik secara nasional hingga manca negara. Perkembangan desa wisata di Provinsi Yogyakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, hal tersebut dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 1.1jumlah Desa Wisata Provinsi Yogyakarta 2018 - 2021**

Desa Wisata	2018	2019	2020	2021
Jumlah Desa Wisata Maju	25	48	60	31
Jumlah Desa Wisata Berkembang	57	39	33	39
Jumlah Desa Wisata Tumbuh/Embrio	50	48	48	75
Total	132	135	141	145

Sumber : bappeda.jogjaprovo.go.id

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah desa wisata di Provinsi Yogyakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana, pada

tahun 2018 jumlah desa wisata yang meliputi Desa Wisata Maju, Desa Wisata Berkembang dan Desa Wisata Tumbuh/Embrio sebanyak 132 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi 135 desa wisata hingga pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 145 desa wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa provinsi Yogyakarta berfokus pada pemanfaatan potensi lokal dalam mengembangkan daerahnya melalui pengembangan desa wisata.

Pemanfaatan potensi lokal membuat Yogyakarta terkenal dengan kebudayaan dan berbagai tempat atau kawasan wisata yang mengagumkan, terutama dari segi budaya lokal dan peninggalan sejarah. Dimana, hal ini menarik banyak wisatawan untuk datang berkunjung ke Yogyakarta baik wisatawan lokal, wisatawan domestik yang berasal dari luar Yogyakarta bahkan dari wisatawan mancanegara. Berikut merupakan data jumlah pengunjung wisata Yogyakarta.

**Tabel 1.2 Data Jumlah Pengunjung Yang Berkunjung Ke Yogyakarta 2014-2019**

No	Tahun	Pengunjung Prov. D.I Yogyakarta		Jumlah
		Wisatawan Mancanegara	Wisatawan Nusantara	
1	2015	232.913	5.388.352	5.619.231
2	2016	249.481	5.271.471	5.520.952
3	2017	297.695	5.049.608	5.347.303
4	2018	416.372	5.272.719	5.689.091
5	2019	433.027	6.116.354	6.549.381

Sumber : BPS kepariwisataan DIY

Dalam tabel 1.2 menjelaskan bahwa data jumlah pengunjung yang berkunjung ke Yogyakarta pada tahun 2015 - 2019. Dalam tahun tersebut dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 2015 sampai 2019 jumlah pengunjung di Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan dari wisatawan mancanegara ataupun wisatawan nusantara. Pada tahun 2015 jumlah pengunjung yang

berkunjung di Yogyakarta sebanyak 5.619.231, Pada tahun 2016 jumlah pengunjung sebanyak 5.520.952, Pada tahun 2017 jumlah pengunjung sebanyak 5.347.303, Pada tahun 2018 jumlah pengunjung sebanyak 5.689.091 dan Pada tahun 2019 jumlah pengunjung mengalami peningkatan di bandingkan dengan tahun sebelumnya sebanyak 6.549.381 Jiwa yang berkunjung di Daerah istimewa Yogyakarta.

Peningkatan Pariwisata diharapkan mampu meningkatkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah keadaan dimana ekonomi dalam suatu negara menjalankan suatu proses untuk mencapai peningkatan pendapatan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi telah memperkuat integrasi dan solidaritas sosial, serta memperluas kemampuan dan akses orang terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, tempat tinggal dan perlindungan sosial. Dalam 30-40 tahun terakhir telah terjadi peningkatan standar hidup manusia, seperti usia harapan hidup semakin panjang, kematian ibu dan bayi semakin menurun, kemampuan membaca dan angka partisipasi sekolah juga semakin membaik. Namun demikian, di banyak negara berkembang, persoalan globalisasi dan ekonomi pasar bebas telah memperlebar kesenjangan, menimbulkan kerusakan lingkungan, menggerus budaya dan bahasa lokal, serta memperparah kemiskinan.

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti tertarik untuk lebih dalam meneliti bagaimana pandangan masyarakat terhadap sector pariwisata sebagai faktor meningkatnya angka pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penelitian ini mengambil judul **“Analisa Perkembangan Sektor**



## **Ekonomi Pariwisata Pada Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Kebijakan Dana Desa”**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan dari pemaparan latar belakang di atas, maka didapat beberapa masalah yaitu:

1. Dana desa yang diperuntukkan bagi sector wisata mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi didaerah tersebut.
2. Dampak yang ditimbulkan dari meningkatnya angka wisatawan terhadap pendapatan masyarakat di Prov. DIY
3. Dampak Dana desa yang difokuskan pada sector pariwisata mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi terutama bagi masyarakat di Prov. DIY

### **1.3 Batasan dan Rumusan Masalah**

#### **1.3.1 Batasan Masalah**

Berdasarkan identifikasi masalah penulis membatasi masalah yang lebih terperinci dan jelas agar pemecahannya terarah dan berhasil. Jadi penelitian ini dibatasi pada masalah kondisi sosial ekonomi masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

#### **1.3.2 Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perkembangan indikator social ekonomi pada sektor pariwisata untuk Provinsi D.I Yogyakarta selama pemberlakuan kebijakan Dana Desa?

2. Seberapa besar penambahan jumlah destinasi dan kunjungan wisata (orang), pada wilayah provinsi di Yogyakarta setelah kebijakan Dana Desa dan Dana Desa? Sebelum ambil data 2014

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Melakukan analisa ekonomi secara deskriptif untuk indikator ekonomi bagi sektor pendukung pariwisata untuk Kota dan Provinsi Yogyakarta tahun 2015-2019 pasca kebijakan Dana Desa.
2. Menganalisis penambahan jumlah destinasi wisata dengan klasifikasi destinasi Heritage, religi, alam, seni dan budaya serta edukasi pada wilayah provinsi DI Yogyakarta setelah kebijakan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

##### **1.5.1 Akademik**

1. Untuk bahan kegiatan atau rujukan dalam mengembangkan penelitian dan untuk bahan acuan untuk mengembangkan penelitian.
2. Untuk menyelesaikan study sarjana prodi Ekonomi Pembangunan

##### **1.5.2 Non Akademik**

1. Sebagai referensi dan informasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.
2. Dan semoga dapat menjadi bahan informasi yang sebenarnya kepada masyarakat

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Uraian Teoritis**

##### **2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat. Sedangkan kuznet (Jhingan, 2000:57) mendefinisikan pertumbuhan ekonomi suatu negara sebagai kemampuan negara untuk menyediakan barang-barang ekonomi yang terus mengikat bagi penduduknya, pertumbuhan kemampuan ini berdasarkan pada kemajuan teknologi dan kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkannya.

Pertumbuhan ekonomi ialah proses kenaikan output per kapita yang terus menerus dalam jangka panjang (Sukirno, 2004 : 435). Pertumbuhan ekonomi tersebut merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan. Dengan demikian, semakin tingginya pertumbuhan ekonomi biasanya semakin tinggi pula kesejahteraan masyarakat, meskipun terdapat indikator yang lain yaitu distribusi pendapatan.

#### **A. Teori pertumbuhan Ekonomi Klasik**

##### **1. Adam Smith**

Teori pertumbuhan ekonomi Adam Smith dalam bukunya berjudul *An inquiry into the nature of the wealth of the nation* ditandai oleh dua faktor yang saling berkaitan yaitu pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan output total.

##### **a) Pertumbuhan output**

Sistem produksi nasional suatu negara terdiri dari tiga unsur

pokoknya, yaitu :

1. Sumber daya alam
2. Sumber daya manusia
3. Stok kapital yang tersedia

Sumber-sumber alam merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber-sumber alam yang tersedia merupakan batas maksimal bagi pertumbuhan perekonomian tersebut. Artinya, selama sumber-sumber ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maka pertumbuhan ekonomi masih tetap bisa ditingkatkan. Selanjutnya unsur jumlah penduduk dan stok kapital menentukan besarnya output masyarakat dari tahun ke tahun.

Tetapi apabila output terus meningkat, sumber-sumber alam akhirnya akan sepenuhnya dimanfaatkan (dieksploitasi) hingga batas ketersediaannya. Tingkat ketersediaan sumber daya alam ini akan menjadi batas atas dari pertumbuhan suatu perekonomian. Pertumbuhan ekonomi (dalam arti pertumbuhan output dan pertumbuhan penduduk) akan berhenti apabila batas atas ini dicapai.

Unsur yang kedua adalah sumber daya manusia atau jumlah penduduk. Dalam proses pertumbuhan output, unsur ini dianggap mempunyai peranan aktif, dalam arti bahwa jumlah penduduk akan menyesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja. Misalnya apabila stok kapital yang tersedia membutuhkan pekerja 1 juta orang untuk menggunakannya, sementara jumlah tenaga kerja yang tersedia hanya 900 ribu orang maka jumlah penduduk yang akan menempati pekerjaan itu akan cenderung meningkat sehingga tenaga kerja yang tersedia akhirnya akan mencapai 1 juta orang.

Unsur produksi yang ketiga yaitu stok kapital, yang secara aktif menentukan *output*. Smith memang memberikan peranan sentral kepada pertumbuhan stok kapital atau akumulasi kapital dalam proses pertumbuhan *output*. Apa yang terjadi dengan tingkat *output* tergantung pada apa yang terjadi pada stok kapital. Di samping itu laju pertumbuhan *output* juga tergantung pada laju pertumbuhan stok kapital. Pertumbuhan itu akan terus melaju hingga akan dibatasi oleh ketersediaan sumber daya alam dan dukungan sumber daya manusia yang terampil.

#### b) Pertumbuhan penduduk

Mengenai peranan penduduk dalam pembangunan ekonomi, Adam Smith berpendapat bahwa perkembangan penduduk akan mendorong pembangunan ekonomi. Penduduk yang bertambah akan memperluas pasar, maka akan meningkatkan spesialisasi dalam perekonomian tersebut. Perkembangan spesialisasi dan pembagian kerja akan mempercepat proses pembangunan ekonomi karena adanya spesialisasi akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan mendorong perkembangan teknologi (Sukirno, 2006).

## 2. David Ricardo

Menurut Ricardo, proses pertumbuhan ekonomi masih pada perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan pertumbuhan *output*. Kesimpulan umumnya juga masih tetap sama yaitu bahwa dalam perpacuan tersebut penduduklah yang akhirnya mencapai posisi stasioner. Seperti juga dengan Adam Smith, Ricardo menganggap bahwa jumlah faktor produksi tanah (yaitu, sumber-sumber alam) tidak dapat bertambah sehingga akhirnya bertindak sebagai faktor pembatasan dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Perbedaan terutama

terletak pada penggunaan alat analisis mengenai distribusi pendapatan (berdasarkan teori Ricardo yang terkenal itu) dalam penjabaran mekanisme pertumbuhan dan pengungkapan peranan yang lebih jelas dari sektor pertanian di antara sektor-sektor lain dalam proses pertumbuhan. (Kuncoro, 2000)

Proses pertumbuhan yang digambarkan Ricardo ditandai dengan ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Terbatasnya jumlah tanah, yang sangat susah untuk diperluas, sebagai faktor produksi.
- b. Peningkatan atau penurunan ketersediaan tenaga kerja (penduduk) sesuai dengan tingkat upah yaitu apakah di atas atau dibawah tingkat upah minimal, yang oleh Ricardo disebut tingkat upah alamiah (*natural wage*).
- c. Akumulasi kapital terjadi apabila keuntungan minimal yang diperlukan untuk menarik mereka melakukan investasi meningkat.
- d. Dari waktu ke waktu terjadi kemajuan teknologi.
- e. Masih dominannya sektor pertanian dalam ekonomi keseluruhan.

### 3. Thomas Robert Malthus

Dalam pandangan mazhab Klasik mengenai perkembangan ekonomi secara umum, nampak adanya pengaruh dari gagasan Malthus tentang signifikansi masalah penambahan penduduk terhadap perkembangan ekonomi. Dengan demikian maka hal ini perlu diperhatikan karena masalah penduduk mempunyai arti dan relevansi terhadap perkembangan ekonomi. Menurut Malthus secara alamiah populasi akan terus mengalami peningkatan lebih cepat dari pada suplai makanan. Produksi makanan per kapita, tentu saja akan mengalami penurunan,

sementara populasi mengalami kenaikan. Malthus berpendapat bahwa tidak menjadi jaminan kalau pertambahan penduduk secara kuantitatif akan berpengaruh terhadap kelangsungan pertumbuhan. Malthus memberikan sejumlah faktor kendala terhadap kelangsungan pertumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitatif sekali-kali tidak menjadi jaminan bahwa pendapatan realnya juga akan meningkat dengan sepadan. Pertambahan penduduk hanya mendukung pertumbuhan terhadap tata susunan ekonomi, apabila perkembangan ekonomi dapat meningkatkan daya beli real (permintaan efektif) masyarakat secara menyeluruh. Barulah, dalam keadaan demikian maka akan terlaksana akumulasi modal sebagai ciri pokok dalam proses pertumbuhan, sekaligus juga akan menimbulkan permintaan akan tenaga kerja. Kendala terhadap perkembangan tersebut oleh Malthus diungkapkan dalam teorinya mengenai ketidakmampuan untuk berkonsumsi secara memadai (*theory of underconsumption*). (Boediono, 2009).

Masalah penting dalam pembahasan Malthus yang menarik perhatian dan sampai sekarang masih relevan bagi pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang ialah segi institusi yang bersifat sosiologi-ekonomis. Dalam masyarakat di negara-negara maju, termasuk di kalangan cendekiawan, sering terdapat pandangan seolah-olah keterbelakangan dan kemacetan ekonomi di belahan dunia lain (Amerika Latin, Afrika, Asia) disebabkan oleh tabiat dan perilaku penduduk setempat, yaitu sikap memudahkan sesuatu, malas dan mempunyai ketergantungan pada alam yang sangat tinggi, keadaan sumber daya alam yang sangat menguntungkan dan memudahkan kehidupan manusia. (Boediono, 2009).

#### 4. Teori Pertumbuhan Ekonomi Karl Max

Pola pendekatan dinamika (*pattern of dynamic approach*) yang menyangkut perkembangan masyarakat secara menyeluruh dalam jangka panjang, bukanlah cara pandang yang baru timbul di zaman modern. Haluan pemikiran tersebut telah terkandung di dalam gagasan-gagasan pakar - pakar teori klasik. Pola pendekatan demikian lebih menonjol lagi dalam sistem pemikiran Karl Marx, yang dapat dianggap sebagai teori dinamika yang paling komprehensif. Dalam hubungan itu, pandangan para pakar teori klasik dan Karl Marx dapat dimasukkan dalam kategori *grand theories* dan kadang – kadang sebagai *magnificent dynamics*. Karl Marx menyoroti banyak aspek dalam teorinya yang dikenal sebagai teori konflik. Dalam perspektif pertumbuhan ekonomi, Marx menonjolkan pendeskripsian tentang perkembangan masyarakat dalam polanya yang sederhana hingga menjadi masyarakat yang berstruktur kompleks dan dengan pembagian kerja yang ketat dalam masyarakat kapitalis. (Boediono, 2009).

Dalam gagasannya mengenai konsep materialisme historis, Marx mengungkapkan bahwa aktivitas produktif manusia merupakan kunci untuk menganalisis kehidupan manusia. Hal inilah yang menjadi substansi masyarakat kapitalis, yaitu bahwa seluruh masyarakat harus membuat diri mereka produktif dari tahun ke tahun. Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa masyarakat terikat dalam produksi yang bersifat materi. Para kapitalis merupakan pihak yang memiliki posisi tawar tertinggi, sedangkan kaum buruh hanya dapat menjual tenaganya kepada majikan sebagai satu input dalam proses produksi. Maka, terjadilah besar-besaran terhadap kaum buruh. Pada masa itu modal merupakan kunci untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar. Sejalan dengan



perkembangan teknologi, para pengusaha yang menguasai faktor produksi akan berusaha memaksimalkan keuntungannya dengan menginvestasikan akumulasi modal yang diperolehnya. Menurut Marx, kemampuan kapitalis untuk mengakumulasi modal terletak pada kemampuan mereka dalam memanfaatkan nilai lebih dari produktivitas buruh yang dipekerjakannya. Nilai buruh yang dinyatakan dalam bentuk upah merupakan manifestasi dari jumlah tenaga yang diperlukan untuk menghasilkan tenaga buruh tersebut. (Boediono, 2009).

#### 5. Teori Pertumbuhan Ekonomi Keynes

Pendapatan total merupakan fungsi dari pekerjaan total dalam suatu negara. Semakin besar pendapatan nasional, semakin besar volume pekerjaan yang dihasilkannya, demikian sebaliknya. Volume pekerjaan tergantung pada permintaan efektif. Permintaan efektif menentukan tingkat keseimbangan pekerjaan dan pendapatan. Permintaan efektif ditentukan pada titik saat harga permintaan agregat sama dengan harga penawaran agregat. Permintaan efektif terdiri dari permintaan konsumsi dan permintaan investasi. Permintaan konsumsi tergantung pada kecenderungan untuk konsumsi. Yang disebut terakhir ini tidak meningkat secepat kenaikan pendapatan. Jurang antara pendapatan dan konsumsi dapat dijembatani oleh investasi. Jika volume investasi yang diperlukan tak terpenuhi maka harga permintaan agregat akan turun, lebih rendah dari pada harga penawaran agregat. Akibatnya, pendapatan dan pekerjaan akan turun sampai jurang tersebut terjembatani. Jadi perbedaan antara pekerjaan dan pendapatan ini sebagai besar akan tergantung pada investasi. Volume investasi tergantung pada efisiensi marginal dari modal dan suku bunga. Efisiensi marginal dan modal

merupakan tingkat hasil yang diharapkan dari aktiva modal baru. Bilamana harapan lebih tinggi, pengusaha menginvestasi lebih besar. Suku bunga, yang merupakan faktor lainnya dari investasi, tergantung pada kuantitas. Sekarang investasi dapat dinaikkan melalui peningkatan efisiensi marginal dari modal atau penurunan suku bunga. Walaupun kenaikan investasi biasanya menyebabkan kenaikan pekerjaan, ini bisa tidak terjadi jika pada waktu yang sama kecenderungan untuk mengkonsumsi turun. Sebaliknya kecenderungan berkonsumsi dapat mengakibatkan kenaikan pada pekerjaan kenaikan pada investasi. Kenaikan investasi menyebabkan naiknya pendapatan. Dan karena pendapatan meningkat, muncul permintaan yang lebih banyak atas barang konsumsi, yang pada gilirannya menyebabkan kenaikan berikutnya pada pendapatan dan pekerjaan. Proses ini cenderung menggumpal (*kumulatif*). Akibatnya kenaikan tertentu pada investasi menyebabkan kenaikan yang berlipat pada pendapatan melalui kecenderungan berkonsumsi. (Jhingan, 2010)

Hubungan antara kenaikan investasi dan pendapatan ini oleh Keynes disebut multiplier K. Pengali (multiplier) ini memperlihatkan hubungan yang tepat, berkat adanya kecenderungan berkonsumsi tersebut, antara pekerjaan agregat dan pendapatan agregat dengan tingkat investasi. Ini berarti, bila investasi agregat naik, pendapatan akan meningkat, yang besarnya adalah K kali kenaikan investasi tersebut. Rumusnya ialah  $\Delta Y = K\Delta I$ , dan  $1-1/K$  mewakili kecenderungan marginal mengkonsumsi. Jadi pengali  $K = 1/1 - MPC$ . Karena kecenderungan marginal berkonsumsi turun, berkat adanya kenaikan pendapatan, maka diperlukan suntikan investasi dengan dosis besar guna memperoleh tingkat pendapatan dan

pekerjaan yang lebih tinggi dalam perekonomian. Inilah secara singkat teori Keynes mengenai pekerjaan, (Jhingan, 2010)

Keynes tidak membangun suatu model pembangunan ekonomi yang sistematis dalam “*general theory*” –nya. Pembuatan model ini diserahkan kepada para pengikutnya seperti Harrod, Domar, Joan Robinson dan lainnya yang sepenuhnya memanfaatkan peralatan Keynes untuk membuat model – model pertumbuhan ekonomi. Hanya dalam karangannya yang berjudul “*Economic Possibilities for Our Grand Children*” Keynes mengemukakan serentetan syarat pokok kemajuan ekonomi, yaitu (i) kemampuan kita mengendalikan penduduk : (ii) kebulatan tekak menghindari perang dan perselisihan sipil: (iii) kemauan untuk mempercayai ilmu pengetahuan, mempedomani hal-hal yang benar-benar sesuai dengan ilmu pengetahuan: dan (iv) tingkat akumulasi yang ditentukan oleh margin antara produksi dan konsumsi. Sejauh menyangkut kekhawatiran akan masa depan kapitalisme, Keynes bersifat Optimis Keynes menganggap kapitalisme sebagai suatu mekanisme yang mempunyai kekenyalan dan gaya adaptasi yang besar dalam membentuk dirinya sendiri menurut keadaan. Keynes membangun teori kebangkrutan kapitalisnya (stagnasi jangka panjang) berdasarkan over-produksi umum, konsumsi rendah yang kronis dan merosotnya efisiensi marginal modal di masa depan. (Jhingan, 2010)

## B. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

### 1. W.W. Rostow

Teori pertumbuhan ekonomi yang dikemukakan oleh W.W. Rostow yang dimuat dalam *Economics Journal Growth* pada awalnya memuat ide sederhana bahwa transformasi ekonomi setiap negara dapat ditelisik dari aspek sejarah

pertumbuhan ekonominya hanya dalam tiga tahap : tahap prekondisi tinggal landas (yang membutuhkan waktu berabad-abad lamanya), tahap tinggal landas (20-30 tahun), dan tahap kemandirian ekonomi yang terjadi secara terus – menerus, (Boediono, 2009) Dalam hal prakondisi untuk meningkatkan ekonomi suatu negara, penekanannya terdapat pada keseluruhan proses dimana masyarakat berkembang dari suatu tahap ke tahap yang lain. Tahap-tahap yang berbeda ini ditujukan untuk mengidentifikasi variabel - variabel kritis atau strategis yang dianggap mengangkat kondisi – kondisi yang cukup dan perlu untuk perubahan dan transisi menuju tahapan baru yang berkualitas. Teori ini secara mendasar bersifat *unilinear* dan *universal*, serta dianggap bersifat permanen.

Sebagai bagian teori modernisasi, teori ini mengkonsepsikan pembangunan sebagai modernisasi yang dicapai dengan mengikuti model kesuksesan Barat. Para pakar ekonomi menganggap bahwa teori pertumbuhan ini merupakan contoh terbaik dari apa diistilahkan ‘teori modernisasi’. (kuncoro M, .2000) Menurut Rostow, proses pertumbuhan ekonomi bisa dibedakan ke dalam 5 tahap:

1. Masyarakat tradisional (*The Traditional Society*),
2. Masyarakat Pra-Kondisi untuk periode Lepas Landas (*The Preconditions for Take Off*),
3. Proses Lepas Landas (*The Take Off*)
4. Gerak Menuju Kedewasaan (*Maturity*)
5. Tingkat Konsumsi Tinggi (*High Mass Consumption*)

## 2. Harrod – Domar

Teori ini dikembangkan hampir pada waktu yang bersamaan oleh Roy F. Harrod (1984) di Inggris dan Evsey D. Domar (1957) di Amerika Serikat. Mereka menggunakan proses perhitungan yang berbeda tetapi memberikan hasil yang sama, sehingga keduanya dianggap mengemukakan ide yang sama dan disebut teori Harrod – Domar. Teori ini melengkapi teori Keynes, dimana Keynes melihatnya dalam jangka pendek (kondisi statis), sedangkan Harrod – Domar melihatnya dalam jangka panjang (kondisi dinamis). (Boediono, 2009)

Teori Harrod – Domar didasarkan pada asumsi :

- a. Perekonomian bersifat tertutup
- b. Hasrat menabung ( $MPS = s$ ) adalah konstan.
- c. Proses produksi memiliki koefisien yang tetap (*constant return to scale*).
- d. Tingkat pertumbuhan angkatan kerja adalah konstan dan sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk.

Model ini menerangkan dengan asumsi supaya perekonomian dapat mencapai pertumbuhan yang kuat (*steady growth*) dalam jangka panjang. Asumsi yang dimaksud disini adalah kondisi dimana barang modal telah mencapai kapasitas penuh, tabungan memiliki proporsional yang ideal dengan tingkat pendapatan nasional, rasio antara modal dengan produksi (*Capital Out Ratio/COR*) tetap perekonomian terdiri dari dua sektor ( $Y=C+I$ ).

Atas dasar asumsi-asumsi khusus tersebut, Harrod – Domar membuat analisis dan menyimpulkan bahwa pertumbuhan jangka panjang yang mantap (seluruh kenaikan produksi dapat diserap oleh pasar) hanya bisa tercapai apabila terpenuhi syarat-syarat keseimbangan sebagai berikut :

$$g = k = n \dots\dots\dots(2-1)$$

Dimana :

$g$  = *Growth* (tingkat pertumbuhan output)

$k$  = *Capital* (Tingkat pertumbuhan modal)

$n$  = Tingkat pertumbuhan angkatan Kerja

Harrod-Domar mendasarkan teorinya berdasarkan mekanisme pasar tanpa campurtangan pemerintah. Akan tetapi kesimpulannya menunjukkan bahwa pemerintah perlu merencanakan besarnya investasi agar terdapat keseimbangan dalam sisi penawaran dan permintaan barang.

#### A. Produk Domestik Bruto (PDB)

Dalam perekonomian suatu negara terdapat suatu indikator yang digunakan untuk menilai perekonomian sedang berlangsung baik atau buruk. Indikator dalam menilai perekonomian tersebut harus dapat digunakan untuk mengetahui total pendapatan yang diperoleh semua orang dalam perekonomian. Indikator yang sesuai dalam melakukan pengukuran tersebut adalah Produk Domestik Bruto (PDB)/*Gross Domestic Product* (GDP).

*Gross Domestic Product* (GDP) adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa akhir (*final*) yang diproduksi dalam sebuah negara pada suatu periode, dalam *Gross Domestic Product* (GDP) terdapat beberapa hal yang tidak disertakan seperti nilai dari semua kegiatan yang terjadi di luar pasar, kualitas lingkungan dan distribusi pendapatan. 46 selain itu, *Gross Domestic Product* (GDP) juga mengukur dua hal pada saat bersamaan yaitu total pendapatan semua orang dalam perekonomian dan total pembelanjaan negara untuk membeli barang dan jasa hasil dari perekonomian (Mankiw, 2007).

Ada tiga pendekatan yang digunakan dalam menghitung PDB yaitu (Case & Fair, 2008):

a. Pendekatan Pendapatan

Pendekatan pendapatan adalah suatu metode menghitung pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur pendapatan seperti upah, sewa, bunga, dan laba yang diterima oleh semua faktor produksi dalam memproduksi barang akhir.

b. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran adalah suatu metode menghitung pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur jumlah yang dikeluarkan pada semua barang akhir selama satu periode tertentu.

c. Pendekatan Produksi

Pendekatan Produksi adalah metode menghitung pendapatan Domestik Bruto (PDB) yang mengukur nilai produksi yang diciptakan oleh faktor produksi yang ada di suatu negara tanpa membedakan apakah faktor produksi itu milik orang luar negeri atau warga negara ini sendiri.

d. Product Domestic Regional Bruto (PDRB)

Pertumbuhan produk domestik regional bruto yang relative tinggi tersebut belum tentu mencerminkan peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini sangat bergantung kepada perkembangan jumlah penduduk. Jika pertumbuhan penduduk pertengahan tahun lebih tinggi dari pertumbuhan produk Domestik Regional Bruto pada tahun lebih tinggi dari Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto pada tahun yang sama, maka PDRB perkapitanya akan semakin kecil dan sebaliknya, bila pertumbuhan jumlah penduduk terjadi lebih lambat,

maka PDRB per kapitanya akan semakin besar. PDRB per kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk sebagai hasil dari proses produksi.

### **2.1.2 Teori Pendapatan Nasional**

Menjumlahkan seluruh pendapatan agregat yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut. Pada paruh kedua abad ke-18, Francois Quesney adalah yang pertama kali mengukur aktivitas ekonomi atas dasar aliran. Pada tahun 1758 dia mempublikasikan *Tableau Economique*, yang membahas *circular flow* dari output dan pendapatan pada berbagai sektor dalam perekonomian. Pandangannya mungkin terinspirasi dari pengetahuannya tentang aliran memutar atau *circular flow* darah dalam tubuh – Quesney adalah dokter resmi bagi King Louis XV dari Prancis (Manurung, 2008).

Ukuran kasar dari pendapatan nasional dikembangkan di Inggris sekitar dua abad lalu, tetapi perhitungan rinci untuk data ekonomi mikro dikembangkan di Amerika selama *the Great Depression*. Hasil berupa sistem perhitungan pendapatan nasional mencakup sejumlah besar data yang dihimpun dari berbagai sumber di Amerika. Data tersebut diringkas dan dirakit menjadi kerangka yang saling terkait, dan kemudian dilaporkan secara periode oleh pemerintah federal. Perhitungan pendapatan nasional Amerika adalah yang paling luas dilaporkan dan yang paling diamati diseluruh dunia.

Perhitungan pendapatan nasional adalah berdasarkan ide bahwa belanja seseorang menjadi penerimaan orang yang lain. Ide bahwa belanja sama dengan penerimaan ini diungkapkan dalam sistem pembukuan *double-entry*, sehingga belanja pada output agregat dicatat pada satu sisi buku dan pendapatan dari



sumber daya dicatat pada sisi lainnya. GDP dapat diukur dengan belanja total pada produksi Amerika atau dengan pendapatan total yang diterima dari produksi tersebut. Pendekatan pengeluaran menjumlahkan seluruh pengeluaran agregat pada seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi selama satu tahun. Pendekatan pendapatan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diterima selama satu tahun oleh mereka yang memproduksi output tersebut (Manurung, 2008).

#### A. Metode Pengeluaran (*Aggregate expenditure*)

Seperti telah disebutkan di depan, salah satu cara untuk mengukur nilai GDP adalah dengan menjumlahkan seluruh belanja pada barang dan jasa akhir yang diproduksi perekonomian dalam satu tahun. Cara paling mudah untuk memahami pendekatan pengeluaran pada GDP adalah membagi pengeluaran agregat menjadi empat komponen : konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto. Kita akan membahasnya satu per satu (Manurung, 2008).

Konsumsi, atau secara lebih spesifik *pengeluaran konsumsi perorangan*, adalah pembelian barang dan jasa akhir oleh rumah tangga selama satu tahun. Konsumsi adalah belanja yang paling mudah dipahami dan juga bentuk belanja yang terbesar, yaitu sebesar dua pertiga dari GDP Amerika tahun 1990. Konsumsi meliputi pembelian jasa seperti *dry cleaning*, potong rambut, dan perjalanan udara, pembelian tidak tahan lama seperti sabun, sop, dan pembelian barang tahan lama seperti televisi dan mebel. Barang tahan lama adalah yang dapat digunakan paling tidak selama tiga tahun (Manurung, 2008).

Investasi, atau secara lebih spesifik *investasi domestik swasta bruto*, adalah belanja pada barang kapital baru dan tambahan untuk persediaan. Secara lebih umum, investasi meliputi belanja pada produksi saat ini yang tidak

digunakan untuk konsumsi saat ini. Bentuk investasi yang paling penting adalah kapital fisik baru, seperti bangunan dan mesin baru yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Investasi juga meliputi pembelian konstruksi pemukiman baru. Meskipun investasi berfluktuasi dari tahun ke tahun, secara rata-rata investasi bernilai sepertujuh dari GDP Amerika selama tahun 1990-an.

Pembelian pemerintah, atau secara lebih spesifik *konsumsi dan investasi bruto pemerintah*, mencakup belanja semua tingkat pemerintahan pada barang dan jasa, dari pembersihan jalan bersalju sampai pembersihan ruang pengadilan, dari buku perpustakaan sampai upah petugas perpustakaan. Pembelian pemerintah bernilai hampir seperlima dari GDP Amerika selama tahun 1990-an. Pembelian pemerintah, dan juga GDP, tidak mencakup pembayaran transfer, seperti Social Security, bantuan pemerintah kepada penerima bantuan dalam pengertian yang sebenarnya.

Komponen akhir dari pengeluaran agregat adalah hasil interaksi antara perekonomian Amerika dan luar negeri. Ekspor neto sama dengan nilai ekspor barang dan jasa Amerika dikurangi impor barang dan jasa Amerika. Ekspor neto tidak hanya meliputi nilai perdagangan barang (yaitu barang yang dapat Anda jatuhkan di atas kaki anda) tetapi juga jasa (atau *invisibles*, seperti pariwisata, asuransi, akuntansi, dan konsultasi). Mengingat belanja untuk konsumsi, investasi, dan pembelian pemerintah meliputi juga pembelian barang dan jasa, maka belanja tersebut tidak diperhitungkan sebagai bagian dari GDP Amerika, sehingga kita harus mengurangi impor dari ekspor untuk mendapatkan efek neto dari sektor luar negeri pada GDP. Nilai impor Amerika melebihi nilai ekspor

hampir pada setiap selama beberapa dekade terakhir ini, yang berarti bahwa ekspor neto Amerika selama ini selalu negatif.

Dalam pendekatan pengeluaran, pengeluaran agregat negara sama dengan penjumlahan konsumsi, C, investasi, I, pembelian pemerintah, G, dan ekspor neto, yaitu nilai ekspor, X, dikurangi dengan nilai impor, M, atau (X-M). Penjumlahan komponen tersebut menghasilkan pengeluaran agregat, atau GDP :

$$C + I + G (X-M) = \text{Pengeluaran agregat} = \text{GDP} \dots\dots\dots(2-1)$$

#### B. Metode Pendapatan ( Income Methode )

Pendekatan pengeluaran menjumlahkan atau mengagregasikan pendapatan dari suatu produksi. Sistem pembukuan *double-entry* dapat memastikan bahwa nilai output agregat sama dengan pendapatan agregat yang dibayarkan untuk sumberdaya yang digunakan dalam produksi output tersebut: yaitu upah, bunga, sewa, dan laba dari produksi. Harga Hershey Bar mencerminkan pendapatan yang diterima semua pemilik sumber daya sehingga batang permen tersebut sampai di rak grosir. Pendapatan agregat sama dengan penjumlahan semua pendapatan yang diterima pemilik sumber daya dalam perekonomian (karena sumber dayanya digunakan dalam proses produksi). Jadi kita dapat mengatakan bahwa (Manurung, 2008).

$$\text{Pengeluaran agregat} = \text{GDP} = \text{Pendapatan agregat}$$

Suatu produk jadi biasanya diproses oleh beberapa perusahaan dalam perjalanannya menuju konsumen. Meja kayu, misalnya, mulanya sebagai kayu mentah, kemudian dipotong oleh perusahaan pertama, dipotong sesuai kebutuhan mebel oleh perusahaan kedua, dibuat meja oleh perusahaan ketiga, dan dijual oleh perusahaan keempat. *Double counting* dihindari dengan cara hanya

memperhitungkan nilai pasar dari meja pada saat dijual kepada pengguna akhir atau dengan cara menghitung nilai tambah pada setiap tahap produksi. Nilai tambah dari setiap perusahaan sama dengan harga jual barang perusahaan tersebut dikurangi dengan jumlah yang dibayarkan atas input dari perusahaan lain. Nilai tambah tiap tahap mencerminkan nilai tambah pada semua tahap produksi sama dengan nilai pasar barang akhir, dan penjumlahan nilai tambah seluruh barang dan jasa akhirnya adalah sama dengan GDP berdasarkan pendekatan pendapatan.

### C. Metode Produksi Netto ( Nett Production Methode )

Metode pendekatan produksi adalah metode perhitungan pendapatan nasional pertama yang akan kita bahas. Dalam metode ini dijelaskan bahwa perhitungan pendapatan nasional dihitung dari penjumlahan seluruh hasil produksi suatu produk baik barang maupun jasa yang dihasilkan atau diperoleh dari seluruh pelaku kegiatan ekonomi yang ada dalam satu negara serta dalam satu periode ekonomi tertentu kurang lebih tiap tahun sekali. Cara menghitung pendapatan nasionalnya yaitu dengan mengalikan jumlah seluruh produk baik barang ataupun jasa yang telah dihasilkan atau diproduksi dalam kurun waktu satu tahun dengan harga satuan tiap produknya bisa berbentuk barang maupun jasa. Misalkan dalam setahun itu produk baik barang maupun jasa yang bisa diproduksi berjumlah seribu produk, maka hal tersebut harus dikalikan dengan harga satuan yang mereka miliki untuk mendapatkan jumlah atau besarnya pendapatan nasional negara tersebut dalam satu tahunnya.

### 2.1.3 Teori Pembangunan Ekonomi

Pembangunan biasa diartikan sebagai upaya mencapai tingkat pertumbuhan pendapatan per kapita (*income per capita*) yang berkelanjutan agar

negara dapat memperbanyak output yang lebih cepat dibandingkan laju pertumbuhan penduduk. Tingkat dan laju pertumbuhan pendapatan nasional bruto (*gross national income* – GNI) per kapita “riil” sering digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi penduduk keseluruhan seberapa banyak barang dan jasa riil yang tersedia untuk dikonsumsi dan diinvestasikan oleh rata-rata penduduk (Todaro dan Smith, 2011:16).

Pembangunan ekonomi di masa lalu umumnya dipandang dalam kaitannya dengan perubahan secara terencana atas struktur produksi dan kesempatan kerja. Dalam proses ini, peran sektor pertanian akan menurun untuk memberi peluang muncul dan berkembangnya sektor manufaktur dan jasa. Oleh sebab itu, strategi pembangunan biasanya berfokus pada proses industrialisasi yang cepat, yang sering merugikan pembangunan pertanian dan pedesaan (Todaro dan Smith, 2011:17).

Pembangunan ekonomi diartikan sebagai serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga infrastruktur lebih banyak tersedia, perusahaan semakin banyak dan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi dan teknologi semakin meningkat. Sebagai implikasi dari perkembangan ini diharapkan kesempatan kerja akan bertambah, tingkat pendapatan meningkat, dan kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi (Sukirno, 2006).

Salah satu faktor utama dalam pembangunan ekonomi ialah pembentukan atau pengumpulan modal. Ada berbagai pendapat, bahwa dalam pembangunan ekonomi yang dibutuhkan hanya modal materil saja, tetapi ada juga yang

berpendapat bahwa modal manusia juga dibutuhkan dalam pembangunan ekonomi.(Jhingan,2010).

#### A. Teori Pembangunan Ekonomi Klasik

##### 1. Adam Smith

Adam smith (1723-1790) bapak dari ilmu ekonomi modern yang terkenal dengan teori nilainya yaitu teori yang menyelidiki fakto-faktor yang menentukan nilai atau harga suatu barang. Bukunya *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* (1776) yang terkenal dengan buku *Wealth of Nations* yang tema pokoknya mengenai bagaimana perekonomian itu tumbuh. Adam Smith melihat proses pertumbuhan ekonomi itu dari dua segi yaitu pertumbuhan output (GNP) total, dan pertumbuhan penduduk. Pembagian kerja merupakan titik permulaan dari teori pembangunan ekonomi Adam Smith yang meningkatkan daya produktivitas tenaga kerja. (Jhingan *Pembangunan Ekonomi dan Perancangan* halaman 81).

Menurut Smith, sumberdaya alam yang tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumberdaya alam yang tersedia merupakan “batas maksimum” bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumberdaya ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan output. Tetapi pertumbuhan output tersebut akan berhenti jika semua sumberdaya alam tersebut telah digunakan secara penuh sumberdaya insani (jumlah penduduk) mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan output maksudnya, jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat. Stok modal, menurut smith, merupakan

unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat output. Perannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan output. Jumlah dan tingkat pertumbuhan output tergantung pada laju pertumbuhan stok modal (sampai “batas maksimum” dari sumber alam).

Faktor penunjang yang yaitu tingkat keuntungan yang memadai. Tingkat keuntungan ini erat hubungannya dengan luas pasar. Jika pasar tidak tumbuh secepat pertumbuhan modal, maka tingkat keuntungan akan segera merosot, dan pada akhirnya akan mengurangi gairah para pemilik modal untuk melakukan akumulasi modal menurut Adam Smith, dalam jangka panjang tingkat keuntungan tersebut akan menurun dan pada akhirnya akan mencapai tingkat keuntungan minimal pada posisi stasioner perekonomian tersebut.

Kritik terhadap teori Adam Smith Seperti gambarkan, di muka, teori adam smith ini telah memberikan sumbangan yang besar dalam menunjukkan bagaimana pertumbuhan ekonomi terjadi dan fakto-faktor apa yang dapat menghambat. Namun demikian, ada beberapa kritik terhadap teori Adam Smith antara lain :

a. Pembagian Kelas dalam Masyarakat

Teori smith ini didasarkan pada lingkungan sosial ekonomi yang berlaku di inggris dan di beberapa negara Eropa. Teori ini mengasumsikan adanya pembagian masyarakat secara tegas yaitu antara golongan kapitalis (termasuk tuan tanah) dan parah buruh. Padahal dalam kenyataan nya, seringkali kelas menengah mempunyai peran yang sangat penting dalam masyarakat modern. Dengan kata lain, teori smith mengabaikan peranan kelas menengah dalam mendukung pembangunan ekonomi.

## b. Alasan Menabung

Menurut Smith orang yang dapat menabung adalah para kapitalis, tuan tanah, dan lintah darat. Namun ini adalah alasan yang tidak adil, sebab tidak terpikir olehnya bahwa sumber utama tabungan di dalam masyarakat yang maju adalah para penerima pendapatan, dan bukan kapitalis serta tuan tanah.

## 2. David Ricardo

Teorinya tidak jauh beda dengan teori Adam Smith (perpacuan antara laju pertumbuhan penduduk dan laju pertumbuhan output). Jumlah faktor produksi (SDA, tanah) tidak bisa bertambah, sehingga akhirnya menjadi faktor pembatasan dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat (Jhingan dan Torado). Teori Ricardo ini diungkapkan dalam bukunya berjudul *The Principles of Political Economy and Taxation* (1917). Melalui teori Ricardian menganalisis mengenai proses terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah “pada awalnya jumlah penduduk sangat rendah dan kekayaan alam masih melimpah. Dalam keadaan seperti ini para pengusaha dalam menjalankan usahanya dengan menggunakan kekayaan alam sebagai faktor produksi mengakibatkan para pengusaha dapat memperoleh keuntungan yang tinggi untuk mempertinggi tingkat modal yang dimiliki sehingga dapat mempertinggi produktifitas tenaga kerja. Dalam perkembangan selanjutnya dengan adanya kenaikan tingkat produktifitas maka para pekerja akan menuntut upah tinggi. Teori tersebut memunculkan beberapa asumsi yaitu :

1. Seluruh tanah digunakan untuk produksi gandum dan angkatan kerja dalam pertanian membantu menentukan distribusi industri
2. Berlakunya hukum : “ law of diminishing return “ bagi tanah
3. Persediaan tanah adalah tetap



4. Permintaan gandum benar- benar inelastik
5. Buruh dan modal adalah masukan yang bersifat variabel
6. Keadaan pengetahuan teknis adalah tertentu
7. Seluruh buruh dibayar dengan upah yang cukup untuk hidup secara minimal
8. Harga penawaran buruh adalah tertentu
9. Permintaan akan buruh tergantung pada pemupukan modal
10. Terdapat persaingan sempurna
11. Pemupukan modal dihasilkan dan keuntungan

Teori David Ricardo hadir dalam kondisi perekonomian yang dikuasai oleh kaum kapitalis yang menganggap bahwa pertumbuhan dan pembangunan ekonomi akan mengalami kenaikan yang signifikan bila mana faktor-faktor produksi diolah secara baik dengan sistem distribusi yang merata. Pemanfaatan teknologi pertanian kurang diperhatikan oleh David Richardo mengingat bahwa tenaga kerja adalah sumberdaya yang bisa dimanfaatkan untuk mengurangi pengangguran yang terjadi.

#### B. Teori Pembangunan Ekonomi Arthur Lewis

Teori Pembangunan Arthur Lewis pada dasarnya membahas proses pembangunan yang terjadi antara daerah kota dan desa, yang mengikutsertakan proses urbanisasi yang terjadi di antara kedua tempat tersebut. Teori ini juga membahas pola investasi yang terjadi di sektor modern dan juga sistem penetapan upah yang berlaku di sektor modern, yang pada akhirnya akan berpengaruh besar terhadap arus urbanisasi yang ada. Lewis mengasumsikan bahwa perekonomian suatu Negara pada dasarnya akan terbagi menjadi dua yaitu :

## 1. Perekonomian Tradisional

Teori Lewis mengasumsikan bahwa daerah pedesaan dengan perekonomian tradisionalnya mengalami surplus tenaga kerja. Surplus tersebut erat kaitannya dengan basis utama perekonomian yang diasumsikan berada di perekonomian tradisional adalah bahwa tingkat hidup masyarakat berada pada kondisi subsisten akibat perekonomian yang bersifat subsisten pula. Hal ini ditandai dengan nilai produk marginal (*marginal product*) dari tenaga kerja yang bernilai nol. Artinya fungsi produksi pada sektor pertanian telah sampai pada tingkat berlakunya hukum *law of diminishing return*. Kondisi nilai menunjukkan bahwa penambahan input variabel tenaga kerja yang terlalu besar. Dalam perekonomian semacam ini, pangsa semua pekerjaan terhadap output yang dihasilkan adalah sama. Dengan demikian, nilai upah riil ditentukan oleh nilai rata-rata produk marginal dan bukan oleh produk marginal dari tenaga kerja itu sendiri.

## 2. Perekonomian Industri

Perekonomian ini terletak di perkotaan, di mana sektor yang berperan penting adalah sektor industri. Ciri dari perekonomian ini adalah tingkat produktivitas yang tinggi dari input yang digunakan, termasuk tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa nilai produk marginal terutama tenaga kerja bernilai positif. Dengan demikian, perekonomian di perkotaan akan merupakan daerah tujuan bagi para pekerja yang berasal dari pedesaan, karena nilai produk marginal dari tenaga kerja yang positif menunjukkan bahwa fungsi produksi belum berada pada tingkat optimal yang mungkin dicapai. Jika ini terjadi, berarti penambahan tenaga kerja pada sistem produksi yang ada akan meningkatkan *output* yang

diproduksi. Maka industri di perkotaan masih menyediakan lapangan pekerjaan, dan ini akan dipenuhi oleh masyarakat pedesaan dengan jalan berurbanisasi. Lewis mengasumsikan pula bahwa tingkat upah di kota 30% lebih tinggi dari padatingkat upah di pedesaan yang relatif bersifat subsisten dan tingkat upah cenderung tetap, sehingga kurva penawaran tenaga kerja akan berbentuk *horizontal*. Perbedaan upah tersebut jelas akan menambah daya tarik untuk melakukan urbanisasi.

### C. Teori Pembangunan Ekonomi Hollis B. Chenery

Analisis teori *Pattern of Development* memfokuskan terhadap perubahan struktur dalam tahapan proses perubahan ekonomi, industri dan struktur institusi dari perekonomian negara sedang berkembang, yang mengalami transformasi dari pertanian tradisional beralih ke sektor industri sebagai mesin utama pertumbuhan ekonominya. Penelitian yang dilakukan Hollis B. Chenery tentang transformasi struktur produksi menunjukkan bahwa sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita, perekonomian suatu negara akan bergeser dari yang semula mengandalkan sektor pertanian menuju ke sektor industri. Peningkatan peran sektor industri dalam perekonomian sejalan dengan peningkatan pendapatan per kapita yang terjadi di suatu negara, berhubungan erat dengan akumulasi capital dan peningkatan sumberdaya manusia (*human capital*). (Todaro & Smith, 2011).

Dari sisi tenaga kerja, akan terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian menuju sektor industri, meski pergeseran ini masih tertinggal dibandingkan proses perubahan structural itu sendiri. Dengan keberadaan inilah maka sektor pertanian akan berperan penting dalam peningkatan penyediaan tenaga kerja, baik pada awal hingga akhir dari proses transformasi structural

tersebut. Produktifitas di sektor pertanian yang rendah lambat laun akan mulai meningkat, dan memiliki produktivitas yang sama dengan pekerjaan di sektor industri pada masa tensisi. Dengan demikian, produktifitas tenaga kerja dalam perekonomian secara menyuruh akan mengalami peningkatan. (Todaro & Smith, 2011).

#### D. Teori Pembangunan Ekonomi Fei-Ranis

Teori pembangunan ekonomi Fei-Ranis berkenan dengan suatu negara terbelakang yang berlebihan buruh disertai perekonomian yang miskin sumberdaya, dimana sebagian besar penduduk bergerak di bidang pertanian di tengah pengangguran hebat dan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Ekonominya berhenti. Kebanyakan orang bergerak di lapangan pertanian tradisional.

Asumsi di dalam mengemukakan teori pembangunan ekonominya, Fei dan Rais membuat asumsi berikut :

1. Adanya ekonomi dua-muka yang terbagi dalam sektor, pertanian tradisional yang mandeg, dan sektor industri yang aktif.
2. *Output* sektor pertanian adalah fungsi dari tanah dan buruh aja.
3. Di sektor pertanian tidak ada akumulasi modal selain dalam bentuk penggarapan tanah kembali (reklamasi).
4. Persediaan atau penawaran tanah bersifat tetap.
5. Kegiatan pertanian ditandai dengan hasil (*return to scale*) yang tetap dengan buruh sebagai faktor variabel.
6. Diasumsikan bahwa produktivitas marginal buruh adalah nol. Jika penduduk melampaui jumlah di mana produktivitas marginal buruhnya

nol, buruh dapat dialihkan ke sektor industri tanpa mengurangi keluaran (*output*) pertanian.

7. *Output* sektor industri adalah fungsi dari modal dan buruh aja.
8. Pertumbuhan penduduk dianggap sebagai fenomena eksogen.
9. Upaya nyata di sektor industri dianggap tetap dan sama dengan tingkat pendapatan nyata (sebelumnya) sektor pertanian.
10. Pekerja di masing-masing sektor hanya mengkonsumsi produk-produk pertanian.

Berdasarkan asumsi, Fei dan Rais menelaah pembangunan ekonomi surplus-buruh menjadi tiga tahap. Pada *tahap pertama*, para penganggur tersamar yang tidak menambah *output* pertanian, dialihkan ke sektor industri dengan upah institusional yang sama. Pada *tahap kedua*, pekerja pertanian menambah keluaran pertanian tetapi memproduksi lebih kecil dari pada upah institusional yang mereka peroleh. Ini mengawali tahap ketiga, yang menandai akhir tahap tinggal landas dan awal pertumbuhan swasembada pada saat buruh pertanian menghasilkan lebih besar dari pada perolehan upah institusional.

#### **2.1.4 Teori Ketimpangan Ekonomi**

Ketimpangan/disparitas antar daerah merupakan hal yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografi yang terdapat pada masing-masing wilayah. Perbedaan ini membuat kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Oleh karena itu di setiap daerah biasanya terdapat daerah maju (Developed Region) dan daerah terbelakang (Underdeveloped Region) (Sjafrizal, 2012).

Menurut Kuncoro (2006), ketimpangan mengacu pada standar hidup yang relatif pada seluruh masyarakat, karena kesenjangan antar wilayah yaitu adanya perbedaan faktor anugrah awal (endowment factor). Perbedaan ini yang membuat tingkat pembangunan di berbagai wilayah dan daerah berbeda-beda, sehingga menimbulkan gap atau jurang kesejahteraan di berbagai wilayah tersebut (Sukirno, 2010).

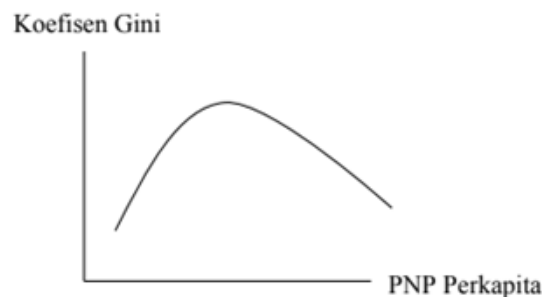
Ketimpangan antar wilayah dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya mengenai Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012). Menurut Hipotesa Neo-Klasik, pada awal proses pembangunan suatu negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung mengalami peningkatan. Proses ini akan terus terjadi hingga ketimpangan mencapai titik puncak. Kemudian, bila proses pembangunan berlanjut maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah tersebut akan mengalami penurunan. Berdasarkan hipotesa ini, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih tinggi umumnya pada negara-negara sedang berkembang, dan akan terjadi sebaliknya pada negara-negara maju. Dengan kata lain, kurva ketimpangan pembangunan antar wilayah berbentuk huruf U terbalik.

Kebenaran Hipotesa Neo-Klasik ini diuji kebenarannya oleh Williamson (1966) melalui studi mengenai ketimpangan pembangunan antar wilayah pada negara maju dan negara sedang berkembang menggunakan data time series dan cross section. Hasilnya menunjukkan bahwa Hipotesa Neo-Klasik terbukti benar

secara empirik. Ini berarti bahwa proses pembangunan suatu negara tidak langsung dapat menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah, akan tetapi pada tahap permulaan justru terjadi hal yang sebaliknya (Sjafrizal, 2012).

Simon Kuznet (1955) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan akan memburuk, namun pada tahap selanjutnya, distribusi pendapatannya akan mengalami peningkatan. Observasi inilah yang kemudian, dikenal sebagai kurva Kuznet “U-Terbalik”, karena perubahan longitudinal (time-series) dalam distribusi pendapatan. Kurva Kuznet dapat dihasilkan oleh proses pertumbuhan berkesinambungan yang berasal dari perluasan sektor modern.

**Gambar 2.1 Kurva Kuznets**



Sumber : Todaro, M.P. dan Smith (2006)

Hipotesis tersebut berawal dari pertumbuhan ekonomi yang awalnya meningkat pada tingkat kesenjangan pendapatan rendah sampai pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu kemudian mengalami penurunan. Kuznet menyebutkan bahwa diantara faktor-faktor sosial, ekonomi dan politik yang mempengaruhi pola U, terdapat faktor penting yaitu terpusatnya modal pada Koefisien Gini PNP

Perkapita kelompok pendapatan tinggi dan adanya pergeseran penduduk dari sektor pertanian tradisional ke sektor industri modern.

Williamson menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat region di suatu negara. Terjadinya ketimpangan antar daerah juga dijelaskan oleh Myrdal (1957). Myrdal membangun teori keterbelakangan dan pembangunan ekonominya disekitar ide ketimpangan regional pada taraf nasional dan internasional. Untuk menjelaskannya menggunakan spread effect dan backwash effect sebagai pengaruh penjaralan dari pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Spread effect (dampak sebar) diartikan sebagai suatu pengaruh yang mendatangkan keuntungan (favourable effect), mencakup aliran kegiatan-kegiatan investasi di pusat pertumbuhan ke daerah sekitar. Backwash effect (dampak balik) diartikan sebagai pengaruh yang mendatangkan kerugian (infavourable effect), mencakup aliran manusia dari wilayah sekitar atau pinggiran termasuk aliran modal ke wilayah inti dan mengakibatkan berkurangnya modal pembangunan bagi wilayah pinggiran yang sebenarnya diperlukan untuk dapat mengimbangi perkembangan wilayah inti. Menurut Myrdal (1957), terjadinya ketimpangan regional karena besarnya pengaruh dari backwash effect dibandingkan dengan spread effect di negara-negara terbelakang. Perpindahan modal akan meningkatkan ketimpangan regional, peningkatan permintaan ke wilayah maju akan merangsang investasi yang pada gilirannya meningkatkan pendapatan yang menyebabkan putaran kedua investasi dan seterusnya. Lingkup investasi yang lebih baik pada sentra-sentra pengembangan dapat menciptakan kelangkaan modal di wilayah terbelakang (Jhingan, 2010).



## A. Ukuran Ketimpangan

### 1. Size Distribution

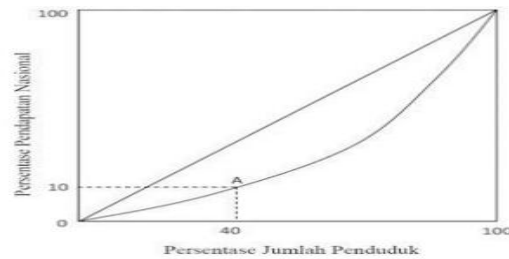
Secara umum ukuran ketimpangan yang pertama ini dihitung dengan menghitung berapa persen pendapatan yang diterima oleh 40 persen penduduk yang paling miskin. Selanjutnya ukuran ketimpangan bisa pula dilakukan dengan memperbandingkan persentase pendapatan yang diterima oleh 40 persen orang paling miskin dengan persentase yang diterima oleh 20 persen orang paling kaya.

- a. Tingkat ketimpangan berat apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima kurang dari 12 persen pendapatan nasional.
- b. Tingkat ketimpangan sedang apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima antara 12-17 persen dari pendapatan nasional.
- c. Tingkat ketimpangan ringan apabila 40 persen penduduk paling miskin menerima diatas 17 persen dari pendapatan nasional.

### 2. Kurva Lorenz

Kurva Lorenz adalah kurva yang dibuat berdasarkan angka-angka yang digunakan dalam perhitungan size distribution dengan cara menampilkannya dalam bentuk kurva. Dengan menggunakan garis horisontal seavafai persentase penduduk dan garis vertikal sebagai persentase pendapatan yang diterima oleh kelompok penduduk, maka data dalam size distribution bisa digambarkan dalam bentuk kurva lorenz berikut.

**Gambar 2.2 Kurva Lorenz**



Sumber : Dumairy (1996)

### 3. Indeks Gini

Ukuran ketiga adalah Indeks Gini yang dihitung dengan menggunakan kurva Lorenz. Caranya dengan membandingkan atau membagi bidang yang dibatasi oleh garis diagonal dalam kurva Lorenz dengan garis lengkung sebagai penyimpangan atas diagonal. Angka yang didapatkan kemudian disebut indeks atau koefisien atau rasio gini. Indeks gini berkisar antara nol dan satu. Gini sebesar 0 menunjukkan pemerataan sempurna dimana semua orang mempunyai pendapatan yang persis sama. Sedangkan gini indeks 1 artinya ada ketidakmerataan yang sempurna.

#### c. Penyebab Ketimpangan Ekonomi

Adelman dan Morris (1973) mengemukakan 8 faktor yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan di negara-negara sedang berkembang, yaitu:

1. Tingginya penambahan penduduk yang berdampak pada penurunan pendapatan per kapita;
2. Inflasi yaitu bertambahnya pendapatan uang tetapi tidak dengan penambahan produksi barang-barang;
3. Ketimpangan pembangunan antar daerah;

4. Banyaknya investasi dalam proyek-proyek yang padat modal (capital intensive), sehingga persentase pendapatan modal dari tambahan harta lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan yang berasal dari kerja, maka pengangguran bertambah;
5. Mobilitas social yang rendah
6. Pelaksanaan kebijaksanaan industri substitusi impor yang mengakibatkan harga-harga barang hasil industri mengalami kenaikan untuk melindungi usaha-usaha golongan kapitalis;
7. Ketidak elastisan permintaan negara-negara terhadap barang ekspor negara-negara sedang berkembang yang menyebabkan memburuknya nilai tukar (term of trade) bagi negara-negara sedang berkembang dalam perdagangan dengan negara-negara maju, dan
8. Industri-industri kerajinan rakyat seperti pertukangan, industri rumah tangga, dan lain-lain menjadi hancur.

## **2.2 Regulasi tentang Kebijakan Dana Desa**

Dana desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara (APBN) yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat desa, dalam melaksanakan program-program dana desa sebenarnya juga dapat menjadi pemicu pembangunan desa melalui potensi geografis, ekonomi, sosial serta lingkungan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui mekanisme transfer kepada Kabupaten/Kota Berdasarkan alokasi Dana tersebut, maka tiap Kabupaten/Kota mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan

memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka Kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Alokasi anggaran sebagaimana di maksud di atas, bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Besaran alokasi anggaran yang di peruntukan langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah secara bertahap.

Dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa dengan cara mendistribusikan keuangan negara kepada desa dalam bidang pembangunan dan khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan salah satu dana yang dialokasikan kepada Desa untuk membantu kegiatan pemerintahan di Desa seluruh Indonesia. Dana Desa menjadi salah satu sumber pendapatan desa yang harus ada dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), dimana dana tersebut akan diterima desa setiap tahunnya dari pemerintah pusat yang penyalurannya melalui Kabupaten/ Kota. Adapun mekanisme penyaluran dana desa yang berada di Rekening Kas Umum Negara kemudian ditransfer kepada Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/ Kota selanjutnya ditransfer kembali ke Rekening Kas Desa untuk digunakan atau dikelola oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Adanya kebijakan penggunaan Dana Desa ini ditujukan pada kegiatankegiatan di desa yang telah ditetapkan prioritasnya sesuai dengan apa yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan

Pembangunan Desa (MusrenbangDes) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDDes) setiap tahunnya. Berkaitan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, penggunaan Dana Desa tentu harus dilaksanakan secara swakelola guna untuk penyerapan tenaga kerja di Desa, terkhusus bagi masyarakat Desa yang tergolong berpenghasilan rendah. Dana Desa yang telah diterima Desa kemudian dikelola oleh Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa di bantu oleh Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD) yang terdiri dari Sekretaris Desa, Kepala Seksi dan Bendahara Desa, dimana masing-masing unsur memiliki kewenangan, tugas, serta tanggung jawab berbeda, sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Secara umum Dana Desa yang bersumber dari APBN merupakan dana yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Desa yang kemudian digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa. Kegiatan pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan suatu kondisi ketidaktahuan masyarakat menjadi masyarakat berdaya, lebih produktif, sehingga akan tercipta kemandirian masyarakat.

## 2.3 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2 1 Penelitian Terdahulu**

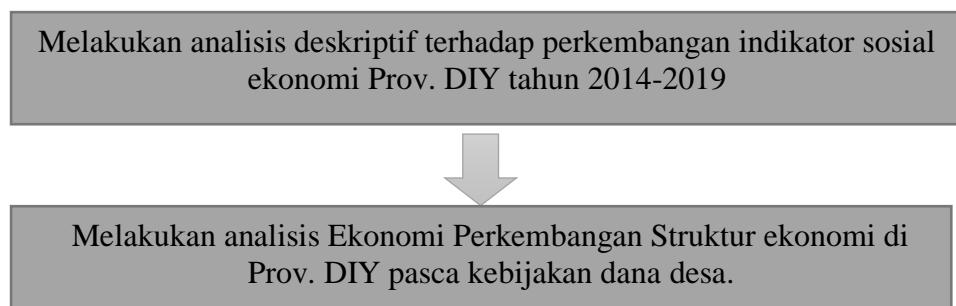
No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	<b>Muhammad, Helen, Aulia, Mardha Adhi Pratama.</b>	Efektivitas dana desa untuk pengembangan potensi ekonomi berbasis partisipasi masyarakat di Desa Bangunjiwo.	Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan dana desa di Desa Bangunjiwo sangat efektif terutama pada pengembangan ekonomi desa untuk memberdayakan masyarakat yang pada akhirnya dapat membantu meningkatkan ekonomi di Desa Bangunjiwo.
2.	<b>Siti, Hilda, Sriniyati.</b>	Dampak alokasi dana desa terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa di Kab. Bantul daerah Istimewa Yogyakarta.	Dana desa memberikan dampak terhadap pembangunan fisik. Adanya Dana desa memberikan kesempatan bagi desa untuk melakukan pembangunan dan pemerintahannya sendiri. Kesempatan tersebut memungkinkan pembangunan sarana, fasilitas, dan infrastruktur desa menjadi lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa di Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.
3.	Yulfan, Rina Sari Qurniawati.	Dana Desa dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Desa Wisata Menggoro	Alokasi Dana Desa dan kebijakan di Desa Menggoro secara normatif dan administratif sudah berjalan dengan baik. Namun, secara substantif penggunaan dana desa untuk memperbaiki fasilitas Wisata Religi Jum'at Paling belum dirasakan dampaknya oleh warga setempat. Hal ini dikarenakan kegiatan jual beli yang dilakukan dalam kegiatan tersebut masih didominasi oleh warga di luar Desa Menggoro. Hal ini berarti warga setempat tidak merasakan dampak langsung dengan adanya alokasi dana desa untuk perbaikan Wisata Religi Jum'at Paling. Kebijakan yang harus dibuat oleh pemerintah adalah mendorong warga setempat untuk lebih berperan aktif dalam kegiatan penjualan di Wisata Religi Jum'at Paling, agar tidak hanya warga luar yang memperoleh manfaat secara ekonomi akan tetapi sebagian besar warga setempat juga merasakan dampaknya.

## 2.4 Kerangka Penelitian

Adapun Kerangka Penelitian berdasarkan pada. Dimana hal-hal yang berhubungan dengan Kondisi Sosial ekonomi sector pariwisata Prov. D.I Yogyakarta dapat dilihat pasca kebijakan dana desa.

### 2.4.1 Kerangka Penelitian

**Gambar 2.3 Kerangka Konseptual**



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah langkah dan prosedur yang dilakukan dalam mengumpulkan informasi empiris guna memecahkan masalah dan menguji hipotesis dari sebuah penelitian. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk penelitian terapan yaitu penelitian yang menyangkut aplikasi teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Berdasarkan metode, penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif yaitu penelitian yang menunjukkan arah hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat, disamping mengukur kekuatan hubungannya. (Kuncoro, 2013)

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian merupakan sebuah mini riset kuantitatif yang dimana bertujuan menganalisis variabel yang berhubungan dengan Analisis Perkembangan Indikator Sosial Provinsi DIY Pasca Kebijakan Dana Desa yang telah ditentukan untuk menjawab rumusan masalah. Data yang akan diteliti adalah data kondisi sosial ekonomi dan dana desa yang bersumber dari website Badan pusat statistik dan Kementerian keuangan serta jurnal-jurnal ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.

#### **3.2 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan acuan dari tujuan pustaka yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana variabel yang satu dengan yang lainnya dapat berhubungan sehingga penelitian sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun variabel yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:



**Tabel 3.1 Definisi Operasional**

<b>Indikator Sosial</b>	<b>Definisi Operasional</b>	<b>Sumber Data</b>
DD (Dana Desa) ➤ Besaran transfer Dana Desa ➤ Pengelolaan dan Pengalokasian Dana Desa	➤ Dana yang bersumber dari APBN yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui anggaran belanja daerah kabupaten atau kota	Kementerian Keuangan
Indikator Sosial Ekonomi	Indikator Sosial ➤ Tingkat Pendidikan ➤ Kesehatan ➤ Tempat Tinggal ➤ Kepemilikan Lahan - Kesejahteraan Indikator Ekonomi ➤ Pekerjaan ➤ Tingkat Pendapatan ➤ Kesejahteraan	Bps Yogyakarta (www.Bps.go.id)
Ekonomi Pariwisata	Menurut Sucipto dan Limbeng (2017:5) Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh sebagian atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.	Google : Ekonomi Pariwisata menurut para ahli

### **3.3 Tempat dan Waktu Penelitian**

#### **a. Tempat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan melihat data seluruh kondisi sosial ekonomi dan dana desa dan provinsi DIY yang disediakan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik.

#### **b. Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini direncanakan selama 3 bulan yaitu Juli sampai Oktober 2020.

### **3.4 Jenis dan Sumber Data**

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Berdasarkan Bentuk : Data Kuantitatif
2. Berdasarkan Sumber Data : Data Sekunder

### **3.5 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pengambilan data secara sekunder melalui website Kementerian Keuangan dan Badan Pusat Statistik.

### **3.6 Objek Penelitian**

Objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data sesuai dengan pendapat objek penelitian merupakan sasaran untuk mendapatkan suatu data sesuai dengan pendapat. Menurut Husein Umar (2005) “objek penelitian menjelaskan tentang apa dan atau siapa yang menjadi objek penelitian. Juga dimana dan kapan penelitian akan dilakukan. Bisa juga ditambahkan hal-hal lain jika dianggap perlu.” Berdasarkan penelitian ini menyimpulkan objek penelitiannya adalah Kondisi sosial ekonomi dan dana desa di Provinsi DIY

### **3.7 Tahapan Penelitian**

#### **3.7.1 Metode Analisis Deskriptif**

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis atau descriptive research. Melalui metode deskriptif analisis peneliti berusaha memaparkan secara jelas berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Menurut pernyataan Nana sudjana dan Ibrahim (2001:64) “penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang telah terjadi pada saat sekarang (pada saa

penelitian dilaksanakan)”. Metode deskriptif analisis merupakan metode yang bermaksud untuk membuat pencadangan(deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Penelitian deskriptif dengan menggunakan data akumulasi dasar dalam cara deskriptif, semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan saling hubungan, mentest hipotesis, membuat ramalan atau mendapatkan makna dan implikasi, walaupun penelitian yang bertujuan untuk menemukan hak tersebut dapat mencakup juga metode-metode deskriptif. Metode analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Perkembangan Indikator Sosial Provinsi DIY Pasca Kebijakan Dana Desa.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Gambaran Umum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

##### **4.1.1 Kondisi Geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) , DIY secara administratif memiliki luas wilayah terkecil kedua di Republik Indonesia setelah DKI Jakarta, dengan luas wilayah hanya 3.185,80 Km<sup>2</sup> , atau 0,17 persen dari wilayah daratan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Posisi geografis DIY berada di bagian tengah Pulau Jawa, tepatnya di sisi selatan. Wilayah daratan DIY dikelilingi oleh wilayah administrasi Provinsi Jawa Tengah, dimana secara lengkap dapat dilihat sebagai berikut

- Sisi Barat Kabupaten Purworejo, Kabupaten Magelang Klaten dan Boyolali di sisi Utara
- Sisi Timur Kabupaten Klaten dan Wonogiri
- Sisi Selatan Samudera Indonesia

Secara topografis wilayah DIY merupakan kombinasi antara daerah pesisir, daratan, dan perbukitan atau pegunungan yang dikelompokkan menjadi empat satuan fisiografis. Pertama, satuan fisiografis Gunung Merapi dengan ketinggian 90 – 2.911 m dan terbentang mulai dari kerucut gunung api hingga daratan fluvial gunung api serta bentang lahan vulkanik di Kabupaten Sleman, kota Yogyakarta dan sebagian Kabupaten Bantul. Kedua, satuan fisiografis 45 Pegunungan Selatan (ketinggian 150 – 700 m) menjadi bagian dari jalur pegunungan Seribu dan terletak di wilayah Kabupaten Gunungkidul. Kawasan ini

didominasi oleh perbukitan batu kapur dan karst yang tandus dan kekurangan air permukaan, sehingga kurang potensial untuk kegiatan pertanian.

Ketiga, satuan fisiografis Pegunungan Kulonprogo, terletak di bagian utara Kulonprogo dan menjadi bentang lahan dengan topografi berbukit. Keempat, satuan fisiografis dataran rendah (ketinggian 0 – 80 m) membentang di bagian selatan wilayah DIY mulai dari Kulonprogo sampai wilayah Bantul yang berbatasan dengan Pegunungan Seribu. Kawasan ini sangat subur dan cukup potensial untuk kegiatan pertanian. (BPS DIY)

Rata-rata suhu udara di wilayah DIY selama tahun 2011 sebesar 26,0 derajat celsius, dengan suhu terendah mencapai 17,5 derajat celsius, dan tertinggi 39,8 derajat celsius. Intensitas hujan selama tahun 2011 lebih rendah dibandingkan dengan 2010. Rata curah hujan per bulan di tahun 2011 lebih rendah dibandingkan 2010. Rata-rata curah hujan per bulan di tahun 2011 tercatat sebesar 172,8 mm dengan rata-rata hari hujan per bulan mencapai 253,6 mm dengan hari hujan 17,4 hari. Curah hujan tertinggi selama 2-11 terjadi di Bulan Februari dengan intensitas sebesar 404,5 mm, sementara pada tahun 2010 terjadi di Bulan Desember dengan curah hujan sebesar 512,3 mm.

Secara administratif, wilayah DIY terbagi menjadi empat kabupaten dan satu kota, yakni Kabupaten Kulonprogo, Bantul, Gunungkidul, dan Kota Yogyakarta. Pusat pemerintahan DIY berada di Kota Yogyakarta. Jumlah kecamatan dan desa atau kelurahan, selama beberapa tahun tidak mengalami perubahan. Jumlah kecamatan di DIY di tahun 2011 adalah 78 kecamatan dan terbagi menjadi 438 desa/kelurahan. Dari 45 kelurahan yang ada, semuanya berstatus sebagai daerah perkotaan. Sementara dari 393 desa yang ada, mayoritas

berstatus sebagai daerah pedesaan (269 desa) dan sisanya sebanyak 124 desa berstatus sebagai daerah perkotaan. (BPS DIY)

Daerah yang memiliki wilayah terluas adalah Kabupaten Gunungkidul dengan luas 1,485,36 km<sup>2</sup> atau 46,62 persen dari wilayah DIY. Kota Yogyakarta memiliki wilayah yang terkecil dengan luas 32,5 km<sup>2</sup> atau 0,01 persen dari wilayah DIY. Meskipun demikian, dengan status sebagai ibukota provinsi kehidupan sosial ekonomi kota Yogyakarta lebih majemuk dan dinamis dibandingkan dengan keempat kabupaten lainnya. (BPS DIY).

**Gambar 4.1 Peta Yogyakarta**



Sumber : [www.yogjakarta.go.id](http://www.yogjakarta.go.id)

#### **4.1.2 Kondisi Topografi Provinsi DIY**

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah Provinsi Jawa Tengah di bagian Barat, Utara, dan Timur, serta Samudera Hindia di bagian Selatan. Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Kulon Progo di bagian barat, Kabupaten Bantul di bagian selatan, Kabupaten

Gunungkidul di bagian barat, Kabupaten Sleman di bagian utara, dan Kota Yogyakarta di bagian tengah.

Letak geografis Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diantara 7°33 - 8°12 Lintang Selatan dan 110°00 - 110°50 Bujur Timur. Ketinggian rata-rata DI Yogyakarta berkisar 113 meter dari permukaan laut dengan permukaan tanah relatif datar, walaupun kondisi topografi kota memiliki kemiringan 1% ke arah selatan. Bagian utara kota paling tinggi pada posisi 129 meter di atas permukaan laut, sedangkan bagian selatan terletak 95 meter di atas permukaan laut.

### A. Luas Wilayah

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu 32,5 Km<sup>2</sup> yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata 13.177 jiwa/Km<sup>2</sup>.

**Tabel 4.1 Luas dan Tinggi Wilayah Provinsi DIY Per Kecamatan Tahun 2018**

Kabupaten/ Kota	Ibukota Kabupaten/Kota	Luas <sup>1</sup>	Persentase terhadap Luas Provinsi	Jumlah Pulau <sup>2</sup>	Tinggi Wilayah (mdpl) <sup>2</sup>	Jarak ke Ibukota <sup>2</sup>
<i>Regency/Municipality</i>	<i>Capital of Regency/Municipality</i>	<i>TotalArea<sub>1</sub> (km<sup>2</sup>/sq.km)</i>	<i>Percentage to Province's Area</i>	<i>Number of Island<sup>2</sup></i>	<i>Altitude (m.a.s.l)</i>	<i>Distance to the Capital</i>
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7
Kulon Progo	Wates	586,28	18,71	1	0 - 965	30
Bantul	Bantul	508,13	16,22	1	45,00	12,00
Gunung kidul	Wonosari	1.431,42	45,69	1	185,00	39,00
Sleman	Sleman	574,82	18,35	1	32,93	16,00
Yogyakarta	Yogyakarta	32,50	1,04	1	114,00	-
D.I. Yogyakarta		3.133,15	100,00			

*Sumber : Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Angka 2019*

Pada tabel di atas yang bersumber pada Badan Pusat Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dilihat bahwa wilayah paling luas di provinsi DIY adalah kabupaten Gunung Kidul dengan luas wilayah sebesar 1.431,42 km<sup>2</sup>/sq.km, sedangkan urutan kedua di tempati oleh kabupaten Kulon Progo yakni sebesar 586,28 km<sup>2</sup>/sq.km. Sedangkan wilayah paling kecil di provinsi DIY adalah Kota Yogyakarta dengan luas wilayah sebesar 32,50 km<sup>2</sup>/sq.km.

## **B. Iklim**

Tipe iklim "AM dan AW", curah hujan rata-rata 2.012 mm/thn dengan 119 hari hujan, suhu rata-rata 27,2°C dan kelembaban rata-rata 24,7%. Angin pada umumnya bertiup angin muson dan pada musim hujan bertiup angin barat daya dengan arah 220° bersifat basah dan mendatangkan hujan, pada musim kemarau bertiup angin muson tenggara yang agak kering dengan arah ± 90° - 140° dengan rata-rata kecepatan 5-16 knot/jam.

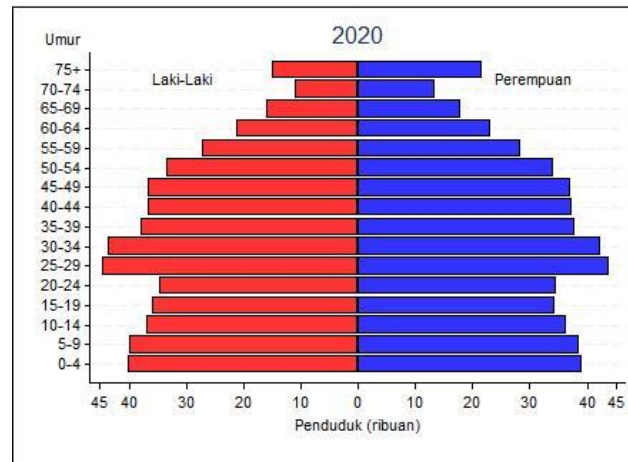
### **4.1.3 Keadaan Penduduk Prov. D.I Yogyakarta**

#### **A. Jumlah Penduduk**

Hasil sensus tahun 2020 penduduk Prov. D.I Yogyakarta adalah 3.882.288 juta jiwa (Sensus Penduduk 2020), dengan laju pertumbuhan penduduk 0,58 persen. Sementara, kepadatan penduduk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah 1.171 jiwa per kilometer persegi.



**Gambar 4.2 Piramida Provinsi Istimewa Yogyakarta Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin**



Sumber : BPS DIY JOGJAKARTA ([www.jogjakarta.bps.com](http://www.jogjakarta.bps.com))

Dari gambar grafik 4.2 dapat di lihat bahwa jumlah penduduk di usia 0-9 tahun banyaknya penduduk laki-laki dan perempuan sama jumlahnya, sedangkan pada kelompok usia 55-75 tahun ke atas, jumlah penduduk perempuan lebih banyak dari pada jumlah penduduk laki-laki. Sedang pada kelompok usia produktif, jumlah penduduk perempuan dan laki-laki berjumlah sama. Dari grafik ini juga dapat kita lihat bahwasanya kelompok usia produktif lebih banyak menanggung beban anak-anak dibandingkan dengan beban lanjut usia.

### **B. Tingkat Kepadatan penduduk**

D.I Yogyakarta dengan jumlah Penduduk 3802.872 jiwa (2018) dengan kepadatan Penduduk 193 jiwa/km<sup>2</sup>. Penyebaran penduduk antar Kecamatan masih timpang, sehingga kepadatan untuk masing-masing Kecamatan belum merata, kepadatan penduduk biasanya berpusat di daerah perkotaan yang umumnya memiliki fasilitas yang dibutuhkan oleh penduduk wilayah pedesaan untuk berusaha di daerah perkotaan, ketidak merataan atau ketimpangan sebaran penduduk tampak lebih jelas jika dikaitkan oleh kepadatan penduduk terutama

mengenai perumahan, kesehatan, dan keamanan, oleh karena itu, distribusi penduduk harus menjadi perhatian khusus pemerintah dalam melaksanakan pembangunan.

Potret tingkat kepadatan penduduk yang lebih tinggi umumnya terkonsentrasi di daerah, kota kota yang memiliki ketersediaan fasilitas yang mencukupi dan memadai, faktor inilah yang merupakan pendorong penduduk untuk melakukan perpindahan (imigrasi), penyebaran penduduk dari tahun ke tahun masih terkonsentrasi pada perkotaan, Kecamatan kulonprogo yang memiliki luas 425.758 km<sup>2</sup>, kepadatan penduduk Kecamatan bantul 1006.692 jiwa, yang terbagi atas 13 desa/kelurahan, selanjutnya, Kecamatan gunung kidul yang luasnya sebesar 736.210 km<sup>2</sup>, dan sekitar 43.500 jiwa penduduk terbagi atas 6 desa/kelurahan, dan Kecamatan Yogyakarta sebagai Kecamatan terpadat ketiga, dengan 1206714 jiwa 22 desa/kelurahan setiap Kilometer persegi wilayah Kecamatan tersebut.

## **4.2 Perkembangan Indikator Sosial dan Ekonomi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Indikator Sosial Ekonomi merupakan sesuatu yang berhubungan dengan masyarakat, di dalam penelitian ini beberapa indikator dari sosial ekonomi yang akan dilihat oleh peneliti antara lain:

### **4.2.1 Indikator Sosial Yogyakarta**

#### **1. Indeks Pembangunan Manusia (Sosial)**

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas fisik non fisik penduduk. Kualitas fisik tercermin dari angka harapan hidup, sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui

lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai *Purchasing Power Parity Index* (PPPI). IPM di bentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu:

- 1) Umur Panjang dan Hidup Sehat
- 2) Pengetahuan
- 3) Standart Hidup Layak

Tetapi di dalam penelitian ini indikator angka melek huruf diganti dengan metode baru yaitu Angka Harapan Sekolah dan PDB per kapita menjadi Pengeluaran Perkapita.

**Tabel 4.2 Indeks Pembangunan Manusia D.I Yogyakarta 2019-2021**

Kabupaten/Kota	Indeks Pembangunan Manusia		
	2019	2020	2021
D.I. Yogyakarta	79,99	79,97	80,22
Kulonprogo	74,44	74,46	74,71
Bantul	80,01	80,01	80,28
Gunungkidul	69,96	69,98	70,16
Sleman	83,85	83,84	84,00
Yogyakarta	86,65	86,61	87,18

Sumber : BPS Provinsi Istimewa Yogyakarta

Dilihat dari Tabel 4.6 Indeks pembangunan manusia Prov. D.I Yogyakarta tahun 2019 sebesar 79,99 mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 79,97. Ini berarti Indeks pembangunan manusia di Prov. D.I Yogyakarta mengalami naik turun selama tahun 2019 – 2021.

## 2. Kemiskinan (Sosial)

Untuk mengukur kemiskinan, Peneliti menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*Basic Needs Approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang di ukur dari sisi

pengeluaran. Jadi penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata – rata pengeluaran perkapita perbulannya dibawah garis kemiskinan. Jadi Peneliti mengukur kemiskinan pada kota Yogyakarta melalui pengeluaran perkapita masyarakat kota Yogyakarta dan garis kemiskinan di kota Yogyakarta.

**Tabel 4.3 Persentase Penduduk Miskin Di Kota Yogyakarta Tahun 2017-2021**

Indikator	Satuan	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kulon Progo</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	312 403	323 105	333 781	353 807	360 202
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	84,17	77,72	74,62	78,06	81,14
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	20,03	18,3	17,39	18,01	18,38
<b>Bantul</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	347 476	369 480	381 538	405 613	418 265
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	139,67	134,84	131,15	138,66	146,98
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	14,07	13,43	12,92	13,5	14,04
<b>Gunung Kidul</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	277 261	288 748	301 125	319 851	325 907
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	135,74	125,76	123,08	127,61	135,33
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	18,65	17,12	16,61	17,07	17,69
<b>Sleman</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	351 331	370 127	382 868	411 610	422 933
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	96,75	92,04	90,17	99,78	108,93
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	8,13	7,65	7,41	8,12	8,64
<b>Yogyakarta</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	423 815	467 061	495 562	533 423	556 674
Jumlah Penduduk Miskin	000 Jiwa	32,2	29,75	29,45	31,62	34,07
Persentase Jumlah Penduduk Miskin	(%)	7,64	6,98	6,84	7,27	7,64
<b>Provinsi DIY</b>						
Garis Kemiskinan	Rupiah	374 009	409 744	432 026	463 479	482 855
Jumlah Pendudukan Miskinan	000 Jiwa	488,53	460,1	448,47	475,72	506,45

Persentase Jumlah Penduduk Miskinan	(%)	13,02	12,13	11,7	12,28	12,8
-------------------------------------	-----	-------	-------	------	-------	------

*Sumber : BPS Provinsi Istimewa Yogyakarta*

Dilihat dari Tabel di atas Kondisi Sosial di Kota Yogyakarta lebih baik daripada Kondisi Sosial di kota/kabupaten disekitarnya. Ini berarti kesejahteraan masyarakat di Kota Yogyakarta tidak di bawah rata-rata Kondisi Sosial yang ada di seluruh Kabupaten dan Kota di Propinsi DIY. Dari Tabel di atas dapat disimpulkan:

a) Kemiskinan

Kemiskinan

- Persentase Jumlah Penduduk Miskin

Persentase Jumlah Penduduk Miskin di Provinsi D.I Yogyakarta dari tahun 2017 – 2021 rata-rata presentase jumlah penduduk miskinnya adalah 12,89 %. Dimana, pada tahun 2017 – 2019 presentase penduduk miskin menunjukkan tren yang menurun yaitu pada tahun 2017 sebesar 13.02% dan pada tahun 2018 – 2019 masing-masing yaitu 12,13% dan 11,7%. Akan tetapi, pada tahun 2020 presentase penduduk miskin mengalami peningkatan yaitu menjadi 12,28%. Hal ini disebabkan oleh dampak pandemic covid-19 yang membuat banyak masyarakat terkena PHK akibat dari pembatasan kegiatan masyarakat.

Apabila dilihat dari presentase Kabupaten, kabupaten Kulon Progo merupakan kabupaten dengan presentase penduduk miskin paling tinggi di provinsi D.I Yogyakarta. Dimana, pada tahun pada tahun 2017 presentase penduduk miskin mencapai 20,03% yang merupakan presentase tertinggi. Pada tahun-tahun berikutnya presentase penduduk miskin mulai mengalami

penurunan yaitu berkisar 17 – 18% namun, presentase tersebut juga masih merupakan presentase tertinggi di wilayah provinsi D.I Yogyakarta.

Wilayah dengan presentase paling sedikit adalah wilayah Yogyakarta. Dimana, pada tahun 2017 presentase penduduk miskin di wilayah ini hanya sebesar 7,64% dan terus mengalami penurunan hingga pada tahun 2019 menjadi 6,84%.

- Jumlah Penduduk miskin

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk kemiskinan Selama kurun waktu 2017-219 di provinsi D.I Yogyakarta mengalami penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2017, jumlah penduduk miskin sebanyak 488,53 ribu jiwa terus turun sampai pada tahun 2018 menjadi 460,1 ribu jiwa dan pada tahun 2019 menjadi 448,7 ribu jiwa.

Apabila dilihat dari wilayah kabupaten/kota provinsi D.I Yogyakarta kabupaten Bantul merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk miskin paling banyak di provinsi D.I Yogyakarta. Meskipun kabupaten ini merupakan kabupaten dengan jumlah penduduk paling banyak akan tetapi, setiap tahunnya tren jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Dimana, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin kabupaten ini sebanyak 139,67 ribu jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2018 – 2019 dengan masing-masing yaotu 134,84 ribu jiwa pada tahun 2018 dan 131,15 ribu jiwa pada tahun 2019.

Apabila dilihat dari jumlah penduduk miskin paling sedikit adalah kota Yogyakarta dan kota ini juga menunjukkan tren penurunan jumlah penduduk miskin setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2017 jumlah penduduk miskin

kota Yogyakarta sebanyak 32,2 ribu jiwa dan mengalami penurunan pada tahun 2018 – 2019 dengan masing-masing yaitu 29,75 ribu jiwa pada tahun 2018 dan 29,45 ribu jiwa pada tahun 2019.

- Garis Kemiskinan

Garis Kemiskinan di provinsi D.I Yogyakarta menunjukkan tren peningkatan setiap tahunnya dimana pada tahun 2017 garis kemiskinan berada di angka 374 009 rupiah, dan pada tahun 2018 menjadi 409 744 rupiah hingga pada tahun 2019 menjadi 432 026 rupiah. Ini berarti taraf hidup masyarakat provinsi D.I Yogyakarta membaik setiap tahunnya.

b) Pendidikan

Aspek pendidikan merupakan suatu hal yang penting bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Salah satu indikator pendidikan merupakan rata-rata lama sekolah yang menggambarkan tingkat pencapaian setiap penduduk dalam kegiatan bersekolah. Semakin tinggi angka lamanya bersekolah semakin tinggi jenjang pendidikan yang telah dicapai penduduk, sehingga indikator ini sangat penting karena dapat menunjukkan kualitas sumber daya manusia.

Untuk melihat kualitas penduduk di wilayah tertentu dari sisi rata-rata jumlah tahun efektif untuk bersekolah yang dicapai penduduk. Jumlah tahun efektif adalah jumlah tahun standar yang harus dijalani oleh seseorang untuk menamatkan suatu jenjang pendidikan, misalnya tamat SD adalah 6 tahun, tamat SMP adalah 9 tahun dan seterusnya. Berikut ini merupakan data rata-rata lama sekolah provinsi DIY.

**Tabel 4.4 Rata-rata lama sekolah Provinsi D.I Yogyakarta menurut kabupaten/kota menurut jenis kelamin tahun 2017 - 2019**

Wilayah	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)					
	Laki-laki			Perempuan		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
DI Yogyakarta	9,74	9,87	9,92	8,73	8,8	8,87
Kulonprogo	9,12	9,13	9,14	8,22	8,23	8,24
Bantul	9,69	9,95	10,07	8,79	8,8	9,04
Gunungkidul	7,74	7,75	7,88	6,33	6,42	6,46
Sleman	11,3	11,31	11,32	10,14	10,15	10,19
Yogyakarta	11,78	11,86	11,87	10,91	10,92	10,95

Sumber : <https://yogyakarta.bps.go.id/>

Dari data di atas dapat dilihat bahwa rata-rata lama sekolah laki-laki di provinsi D.I Yogyakarta adalah 9,8 dan perempuan adalah 8,8. Artinya, rata-rata tingkat pendidikan di D.I Yogyakarta hanya sampai tingkat SMP. Hal ini tentu saja masih di bawah standarisasi pendidikan yang dibuat oleh pemerintah dimana, standarisasi pendidikan adalah wajib 12 tahun atau tamat Sekolah Menengah Atas. Apabila dilihat dari tingkat kabupaten/kota, kabupaten Gunungkidul merupakan kabupaten dengan rata-rata lama sekolah sangat rendah dimana, rata-rata lama sekolah laki-laki selama 7,79 dan wanita hanya 6,4. Artinya, tingkat pendidikan di kabupaten Gunungkidul tidak menamatkan jenjang Sekolah Menengah Pertama. Sedangkan untuk wilayah dengan rata-rata pendidikan paling tinggi di wilayah provinsi D.I Yogyakarta adalah Kota Yogyakarta dengan rata-rata lama sekolah laki-laki selama 11,83 dan perempuan selama 10,92. Hal ini juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan kota Yogyakarta juga masih dibawah standarisasi nasional karena rata-rata tidak menamatkan sekolah menengah atas.



## 4.2.2 Indikator Ekonomi Provinsi DIY

### 1. Nilai PDRB

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu. PDRB bisa juga didefinisikan sebagai jumlah nilai barang dan jasa akhir (Netto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Dan di dalam penelitian ini salah satu untuk mengukur kondisi ekonomi yang diambil adalah Produk Domestik Bruto menurut lapangan usaha dan Atas Dasar Harga Konstan.

**Tabel 4.5 PDRB Menurut Lapangan Usaha ADHK 2010 Kabupaten Mandailing Natal 2018-2021**

PDRB	Harga Konstan 2010			
	2018	2019	2020	2021
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	8 101 233,30	8 184 189,43	8 532 140,34	8 584 394,59
B. Pertambangan dan Penggalian	541 183,60	557 653,48	508 376,02	492 583,23
C. Industri Pengolahan	12 486 855,40	13 200 727,12	12 624 114,36	12 670 356,67
D. Pengadaan Listrik dan Gas	156 706,50	165 217,39	162 929,80	166 847,06
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	94 923,30	103 372,62	103 900,99	110 988,37
F. Konstruksi	9 984 760,00	11 420 640,14	9 636 836,07	10 679 271,35
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	8 219 289,30	8 643 437,94	8 254 025,18	8 379 070,18
H. Transportasi dan Pergudangan	5 304 843,60	5 493 402,23	4 383 207,22	4 467 910,22
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9 383 603,30	10 217 176,87	8 489 705,74	9 130 594,72
J. Informasi dan Komunikasi	10 884 532,60	11 694 991,75	13 994 335,91	16 329 802,61
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3 506 587,60	3 804 310,94	3 763 916,07	3 818 583,14
L. Real Estat	7 079 839,30	7 499 627,37	7 594 529,53	7 637 701,21
M,N. Jasa Perusahaan	1 146 811,60	1 224 235,00	1 041 993,51	1 126 300,80
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7 239 151,90	7 477 921,47	7 310 589,96	7 282 364,57
P. Jasa Pendidikan	8 583 073,60	9 146 783,78	9 555 495,47	10 033 094,42

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2 593 233,40	2 764 571,41	3 294 799,12	3 442 202,15
R,S,T,U. Jasa Lainnya	2 717 386,10	2 887 199,81	2 432 624,88	2 956 490,13
Produk Domestik Regional Bruto	98 024 014,30	104 485 458,76	101 683 520,17	107 308 555,43

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi D.I Yogyakarta, 2022

Dari data di atas dapat dilihat bahwa PDRB provinsi D.I Yogyakarta dalam kurun waktu 2018 – 2021 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Dimana, PDRB D.I Yogyakarta pada tahun 2018 sebesar Rp. 98 024 014,30 juta dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp. 104 485,76 juta. Akan tetapi, pada tahun 2020 PDRB D.I Yogyakarta mengalami penurunan akibat dari pandemic covid-19 yaitu menjadi sebesar Rp. 101 683 530,17 juta. Sedangkan, pada tahun 2021 PDRB D.I Yogyakarta mulai mengalami peningkatan seiring dengan berbagai program pemerintah dalam *recovery* ekonomi yang menyebabkan PDRB meningkat menjadi Rp. 107 308 555,43 juta.

Berdasarkan kontribusi sektoral, sektor Informasi dan Komunikasi merupakan sektor utama dengan penghasil PDRB terbesar di provinsi D.I Yogyakarta sejak tahun 2020. Dimana, sektor ini secara konsisten mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2018 penghasilan PDRB sektor ini mencapai Rp. 10 884 532,60 juta dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi Rp. 11 694 991,75, hingga pada tahun 2021 penghasilan PDRB sektor ini terus meningkat hingga mencapai Rp 16 329 802,61 juta yang membuat sektor ini menjadi sektor paling berkontribusi pada PDRB D.I Yogyakarta,

Sektor kedua dengan penghasilan PDRB terbesar di provinsi D.I Yogyakarta adalah sektor Industri Pengolahan. Dimana, pada tahun 2018 nilai PDRB sektor ini pada tahun 2018 sebesar Rp 12 486 855,40 dan mengalami peningkatan pada tahun 2019 menjadi Rp. 13 200 727,12. Akan tetapi, akibat dari

dampak pandemic covid-19 nilai PDRB sektor ini mengalami penurunan menjadi Rp. 12 624 114,36 juta dan mulai mengalami kenaikan kembali pada tahun 2021 menjadi sebesar Rp. 12 670 356,67 juta.

Dari penjelasan di atas terlihat bahwa pada tahun 2020 rata-rata penghasilan sektoral mengalami penurunan akibat dari adanya pandemi covid-19. Dimana hal tersebut juga mempengaruhi pertumbuhan PDRB sektoral provinsi D.I Yogyakarta. Untuk mengetahui lebih jauh pertumbuhan PDRB sektoral D.I Yogyakarta dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

**Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha D.I. Yogyakarta (Persen)**

<b>17 Kategori PDRB Lapangan Usaha</b>	<b>2021</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0.61	4.25	1.02	2.16
B. Pertambangan dan Penggalian	-3.11	-8.84	3.04	10.59
C. Industri Pengolahan	0.37	-4.37	5.72	5.12
D. Pengadaan Listrik dan Gas	2.40	-1.38	5.43	3.31
E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	6.82	0.51	8.90	5.13
F. Konstruksi	10.82	-15.62	14.38	13.10
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.51	-4.51	5.16	5.54
H. Transportasi dan Pergudangan	1.93	-20.21	3.55	6.60
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7.55	-16.91	8.88	6.77
J. Informasi dan Komunikasi	16.69	19.66	7.45	6.48
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	1.45	-1.06	8.49	6.14
L. Real Estat	0.57	1.27	5.93	5.54
M,N. Jasa Perusahaan	8.09	-14.89	6.75	5.51
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0.39	-2.24	3.30	4.06
P. Jasa Pendidikan	5.00	4.47	6.57	6.01

Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.47	19.18	6.61	6.05
R,S,T,U. Jasa lainnya	21.53	-15.74	6.25	6.19
Produk Domestik Regional Bruto	5.53	-2.68	6.59	6.20

Sumber :

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta tertinggi terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 6.59%. Akan tetapi, pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi provinsi D.I Yogyakarta mengalami pelambatan dan mencapai angka -2.68% akibat dari dampak pandemic covid-19 yang membuat mati surinya roda perekonomian. Apabila kita lihat dari pertumbuhan sektoral pada tahun 2020 hanya terdapat 6 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif dan terdapat 11 sektor lapangan usaha mengalami pertumbuhan negatif. Sedangkan pada tahun 2021 setelah terjadi *recovery* ekonomi terdapat 15 sektoral yang mengalami pertumbuhan positif dan hanya 2 sektoral yang mengalami pertumbuhan negatif.

Apabila dilihat dari tren pertumbuhannya sektor Informasi dan Komunikasi menjadi sektor dengan pertumbuhan paling tinggi dan konsisten. Dimana pada tahun 2020 disaat sektor lainnya terpuruk, sektor ini justru mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu mencapai 19.66% dan pada tahun 2021 pertumbuhannya masih di atas rata-rata pertumbuhan sektoral lainnya dengan pertumbuhan sebesar 16.69%.

## 2. Pertumbuhan Ekonomi (Ekonomi)

Salah satu untuk mengukur Indikator Ekonomi di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan Pertumbuhan Ekonomi pada Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertumbuhan Ekonomi dapat dijadikan sebagai patokan yang melihat kemajuan suatu tempat tertentu dan bagaimana hasil pembangunan yang

dilakukan selama periode tersebut. Pertumbuhan Ekonomi juga menggambarkan bagaimana kemakmuran masyarakat karena dilihat berdasarkan pendapatan perkapita atau pendapatan rata rata dari masyarakat.

### 3. Inflasi (Ekonomi)

Inflasi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta juga selalu mengalami naik turun. Dan salah satu untuk mengukur indikator ekonomi di penelitian ini salah satunya adalah Inflasi di Kota Yogyakarta. Inflasi adalah proses meningkatnya harga secara umum dan terus menerus.

**Tabel 4.7 Kondisi Ekonomi Sebelum Dan Perubahan Indeksi Harga Konsumen Prov. D.I Yogyakarta**

Tingkat Inflasi	2018	2019	2020	2021
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]
Januari	0.55	0.42	0.27	0.54
Tahun Kalender	0.55	0.42	0.27	0.54
Tahun ke Tahun (Januari tahun n terhadap Januari tahun n-1)	3.50	2.53	2.57	1.68

Dilihat dari Kondisi Ekonomi di Prov. D.I Yogyakarta, Tingkat inflasi tahun kalender Januari 2021 sebesar 0,55 persen dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2021 terhadap Januari 2020) sebesar 1,68 persen. Sedangkan tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2020 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2020 terhadap Januari 2019) masing-masing sebesar 0,27 persen dan 2,57 persen. Adapun tingkat inflasi pada periode yang sama tahun kalender 2019 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2019 terhadap Januari 2018) masing-masing sebesar 0,42 persen dan 2,53 persen. Sementara tingkat inflasi

pada periode yang sama tahun kalender 2018 dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2018 terhadap Januari 2017) masing-masing sebesar 0,55 persen dan 3,50 persen.

#### 4.2.3 Data Jumlah Perkembangan Dana Desa Provinsi D.I YOGYAKARTA

Kementerian Keuangan Indonesia memberikan Kebijakan transfer dana daerah berupa Dana Desa yang dilakukan secara merata baik penyebarannya maupun besarnya di seluruh Indonesia tergolong efektif dan masih ada penyalahgunaan transfer dana daerah yang dilakukan oleh oknum-oknum politisi bahkan kepala Daerah. Dengan adanya perbedaan karakteristik luas wilayah, jumlah penduduk, serta angka kemiskinannya dan keadaan perekonomian di setiap desa mengidentifikasi kurang efektifnya penyaluran dana desa. Setiap desa di kota Yogyakarta memiliki kebutuhannya masing-masing, contohnya saja keadaan desa yang maju dengan keadaan desa yang sedang berkembang jauh berbeda dan APBDesnya juga pasti berbeda. Di desa yang sedang membutuhkan dana desa yang lebih, guna meningkatkan keadaan perekonomian. Berikut dapat di lihat pada tabel 4.8 di bawah ini :

**Tabel 4.8 Data Jumlah Perkembangan Dana Desa Provinsi DIY (ribu rupiah)**

No	Kabupaten	2015	2016	2017	2018	2019
1	Bantul (75 Desa)	26.962.671	60.601.265	77.730.491	79.076.105	98.359.905
2	Kulon Progo (87)	26.948.074	60.511.729	77.627.477	76.680.810	90.337.907
3	Gunung kidul (144)	46.117.057	103.567.918	132.353.781	117.574.520	136.052.137
4	Sleman (86)	28.048.816	63.014.717	80.855.813	81.187.698	99.035.176
5	DIY (392 Desa)	128.076.618	287.695.629	368.567.562	354.519.133	423.785.125

Sumber : <http://www.Kemenkeu.go.id>

Pada tabel 4.9 jumlah dana desa dari tahun 2015-2019 di Provinsi D.Istimewa Yogyakarta mengalami peningkatan dari Tahun 2015-2019, sedangkan di Tahun 2019 dana desa yang ada di Kabupaten mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penurunan ini diakibatkan tidak maksimalnya penggunaan dana desa yang ada di desa pada 5 per Kecamatan , penurunan ini diakibatkan tidak maksimalnya penggunaan dana desa yang ada di desa berbeda-beda sesuai dengan kriteria desanya masing-masing . Untuk menunjang aktivitas masyarakat desa seperti pembangunan jalan desa, jembatan, pasar desa, sarana olahraga, dan embung desa. Selain itu juga dana desa dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa seperti membangun polindes, air bersih, mck paud, dan penahan Tanah, jadi penggunaan dana desa setiap tahun dari tahun 2015 sampai 2019 di setiap desa berbeda-beda sesuai dengan yang di butuhkan setiap desa, seperti pembagunan infrastruktur seperti jalan raya, prasarana transportasi umum, jembatan, teknologi dan lain sebagainya. Adapun penyaluran Dana Desa ini adalah untuk pengembangan ekonomi pedesaan melalui BUMDes.

Perkembangan indikator ekonomi bagi sector pariwisata di Provinsi DIY selama adanya kebijakan dana desa dapat kita lihat dari tabel perkembangan dana desa dari tahun 2015 sampai 2019. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berkembang setiap tahunnya. Berarti kebijakan dana desa sudah disalurkan dan dapat dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Adanya dana desa yang telah diberikan pemerintah sangat dimanfaatkan khususnya di sector pariwisata agar dapat meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat serta faktor penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat adalah lingkungan yang masih

terjaga merupakan faktor paling penting dalam peningkatan ekonomi masyarakat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### 4.3 Pertambahan jumlah destinasi dan kunjungan wisata (orang), pada wilayah provinsi di Yogyakarta setelah kebijakan Dana Desa

#### 1. Pertambahan Jumlah Destinasi wisata

Pertambahan jumlah destinasi wisata merupakan salah satu indikator keberhasilan pengembangan kawasan pariwisata dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki sehingga hal ini akan memberikan banyak opsi kepada wisatawan untuk berkunjung. Berikut ini merupakan data perkembangan jumlah destinasi wisata provinsi D.I Yogyakarta.

**Tabel 4.9 Jumlah Destinasi wisata di Provinsi D.I Yogyakarta**

No	Sub Elemen	Tahun				Satuan
		2018	2019	2020	2021	
1	3	4	5	6	7	9
<b>1</b>	<b>Jumlah Objek Wisata</b>	<b>49</b>	<b>91</b>	<b>91</b>	<b>213</b>	
2	Jumlah Objek Wisata Alam	17	32	32	108	Unit
3	Jumlah Objek Wisata Buatan	15	42	42	81	Unit
4	Jumlah Objek Wisata Sejarah	17	17	17	24	Unit
<b>5</b>	<b>Jumlah Desa Wisata</b>	<b>102</b>	<b>135</b>	<b>141</b>	<b>145</b>	
6	Jumlah Desa Wisata Maju	25	48	60	31	Desa
7	Jumlah Desa Wisata Berkembang	57	39	33	39	Desa
8	Jumlah Desa Wisata Tumbuh/Embrio	50	48	48	75	Desa
<b>9</b>	<b>Jumlah Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata) di DIY</b>	<b>129</b>	<b>131</b>	<b>131</b>	<b>164</b>	<b>Kelompok</b>
10	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Gunungkidul	41	42	42	42	Kelompok
<b>11</b>	<b>Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Kulon Progo</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>Kelompok</b>
12	Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Sleman	15	15	15	48	Kelompok
<b>13</b>	<b>Jumlah Pokdarwis di Kabupaten Bantul</b>	<b>39</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>40</b>	<b>Kelompok</b>
14	Jumlah Pokdarwis di Kota Yogyakarta	14	14	14	14	Kelompok

Sumber : *bappeda.jogjapro*

Pertambahan jumlah destinasi wisata di Yogyakarta setelah adanya kebijakan alokasi dana desa dapat dilihat pada Tabel diatas dimana, Jumlah Objek



Wisata di Provinsi D.I Yogyakarta mengalami kenaikan dari tahun 2018 ke 2021 untuk jumlah desa wisata ditahun 2018 sebanyak 102 desa dan untuk jumlah desa wisata di tahun 2019 sebanyak 135 desa, serta untuk tahun-tahun berikutnya yakni 2020 dan 2021 juga mengalami peningkatan jumlah yaitu pada tahun 2020 menjadi 141 desa wisata dan 2021 menjadi 145 desa wisata. Apabila dilihat dari kategori desa wisata pertumbuhan desa wisata dari kategori Berkembang ke kategori Maju juga menunjukkan pertumbuhan yang positif dimana pada tahun 2019 jumlah desa Maju sebanyak 48 desa dan pada tahun 2020 kategori desa wisata maju berjumlah 60 desa wisata. Hal tersebut menunjukkan bahwa tren peningkatan desa wisata di provinsi D.I Yogyakarta cukup baik akibat dari adanya dana desa.

Di D.I Yogyakarta juga telah terbentuk kelompok pemuda yang dinamai dengan POKDARWIS (Kelompok Sadar Wisata) kelompok ini terbentuk untuk tujuan mengelola dan mengembangkan objek wisata mulai dari tahapan perencanaan yang dilakukan bersama aparatur desa hingga pada promosi dan pengembangan objek tersebut. Serta ada keterkaitan dalam pelaksanaan dan pelaporan anggaran pada pemerintah kota Yogyakarta sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan pemerintah tentang sistem pelaporan keuangan negara. Yang mana setiap TPK (Tim Pelaksanaan Kegiatan) diwajibkan menyampaikan laporan keuangan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur bidang pariwisata kepada desa dan BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) untuk setiap kegiatan yang sudah atau yang sedang dilaksanakan sebagai bentuk upaya dari monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan.

## 2. Perkembangan Jumlah Wisatawan Provinsi D.I Yogyakarta

Wisatawan merupakan konsumen utama dari objek pariwisata, sehingga banyaknya wisatawan yang berkunjung ke objek pariwisata akan berdampak kepada perkembangan objek pariwisata tersebut. Hadirnya wisatawan juga akan berdampak kepada masyarakat sekitar seperti membuka kesempatan kerja yang lebih besar sehingga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat di sekitar tempat wisata. Menambah pemasukan suatu negara, baik dalam bentuk pajak dari wisatawan, pertukaran mata uang asing, dan juga belanja para wisatawan selama berada di tempat wisata. Berikut ini merupakan data kunjungan wisatawan provinsi D.I Yogyakarta.

**Tabel 4.10 Jumlah Destinasi wisata di Provinsi D.I Yogyakarta 2015 - 2020**

No	Sub Elemen	Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	3	4	5	6	4	5	6
<b>1</b>	<b>Wisatawan Mancanegara (Wisman)</b>	<b>308.485</b>	<b>355.313</b>	<b>397.933</b>	<b>416.372</b>	<b>433.027</b>	<b>69.968</b>
2	Wisman Benua Asia	-	-	-	-	205.43	32.809
3	Wisman Benua Australia	-	-	-	-	20.342	4.537
4	Wisman Benua Afrika	-	-	-	-	1.258	1.036
5	Wisman Benua Amerika	-	-	-	-	28.901	9.618
6	Wisman Benua Eropa	-	-	-	-	177.093	21.968
<b>7</b>	<b>Wisatawan Nusantara (Wisnus)</b>	<b>3.813.720</b>	<b>4.194.261</b>	<b>4.831.347</b>	<b>5.272.718</b>	<b>6.116.354</b>	<b>1.778.580</b>
8	<b>Total Wisatawan</b>	<b>4.122.205</b>	<b>4.549.574</b>	<b>5.229.280</b>	<b>5.689.090</b>	<b>6.549.381</b>	<b>1.848.548</b>
Tetap   *) Sementara   Sangat Sementara   n/a Tidak ada							

Sumber: <http://bappeda.jogjaprov.go.id/>

Dari data di atas dapat dilihat bahwa perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung ke provinsi D.I Yogyakarta terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dimana, pada tahun 2015 jumlah wisatawan mencapai 4.122.205 orang dan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya yaitu pada tahun 2016 menjadi 4.549.574 orang, pada tahun 2018 5.689.090 orang hingga pada tahun 2019

mencapai angka 6.549.381 orang. Apabila dilihat dari kategori wisatawan, Wisatawan Nusantara merupakan wisatawan yang paling banyak mengunjungi provinsi D.I Yogyakarta. Dimana, rata-rata kunjungan wisatawan nusantara sejak tahun 2015-2019 adalah 4.845.680 orang setiap tahunnya.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perkembangan Indikator Sosial Ekonomi di Provinsi D.I Yogyakarta  
Sesudah Alokasi dana desa sector pariwisata dibandingkan sebelum teralokasi mengalami peningkatan pada semua indikator yaitu: indikator sosial antara lain : IPM dan Kemiskinan, indikator ekonomi anatara lain : PDRB, Pertumbuhan Ekonomi, Inflasi. Ini berarti sesudah terjadinya Alokasi dana desa kesejahteraan masyarakat Provinsi D.I Yogyakarta membaik. Perkembangan Indikator Sosial yaitu Indeks Pembangunan Manusia: Angka Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah, dan Pengeluaran Perkapita mengalami peningkatan hampir seluruhnya sesudah alokasi dana desa pada pemerintahan Jokowi. Dan indikator Ekonomi yaitu PDRB, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi mengalami peningkatan hampir seluruhnya sesudah alokasi dana desa pada masa pimpinan Jokowi.
2. Jumlah dana desa dari tahun 2015-2019 di Provinsi DIY mengalami peningkatan dari Tahun 2015-2019, dan pada tahun 2019 dana desa yang ada di Provinsi DIY mengalami peningkatan tertinggi dari tahun-tahun sebelumnya dengan menyentuh angka Rp.423.785.125.000 yang akan dialokasikan ke 392 desa yang ada di Provinsi DIY.

3. Pertambahan jumlah destinasi wisata di Yogyakarta setelah adanya kebijakan alokasi dana desa mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pertambahan jumlah destinasi wisata di dominasi oleh desa wisata, artinya kenaikan dana desa berdampak pada peningkatan destinasi wisata. Disamping itu, wisatawan yang berkunjung ke provinsi D.I Yogyakarta juga meningkat setiap tahunnya dimana, peningkatan tersebut masih di dominasi oleh wisatawan dalam negeri.

## **5.2 SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut :

1. Pemerintah provinsi D.I Yogyakarta harus lebih meningkatkan edukasi pemanfaatan dana desa dalam pengembangan potensi daerah sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat
2. Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta harus turut aktif mengembangkan destinasi wisata di wilayah D.I Yogyakarta melalui strategi pemasaran yang lebih masiv dan meluas secara global sehingga target pasar tidak hanya bergantung pada wisatawan dalam negeri

## DAFTAR PUSTAKA

- BPS Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam angka, (2018)
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2011). *Pembangunan Ekonomi Jilid 1 (Edisi Kesebelas)*. Jakarta : Erlangga.
- Muhammad, Helen, Aulia, Mardha Adhi Pratama, 2017. *Efektivitas Dana Desa Untuk Pengembangan Potensi Ekonomi Berbasis Partisipasi Masyarakat Di Desa Bangunjiwo*.
- Siti, Hilda, Sriniyati, 2019. *Dampak Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Di Kab. Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta*.
- Yulfan, Rina Sari Qurniawati. 2019. *Dana Desa Dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pada Desa Wisata Menggoro*.
- Kuncoro, Mudrajad. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis (Edisi Keempat)*. Yogyakarta: Erlangga.
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Jhingan, M. 2010. *Ekonomi Pembangunan Dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan: Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan* (Edisi kedua ed.). Jakarta: Kencana Persada Media Group.
- Mankiw, N. G. 2007. *Macroeconomic*, Jakarta : Erlangga.
- Suparmoko, 1998. *Pengantar Ekonomi Makro*. BPFE-UGM Yogyakarta.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan : Teori, Masalah, Kebijakan*. (Edisi Pertama). Yogyakarta : UPP AMP YKPN.

- Arifianto, W., & Setiyono, I. (2013). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Distribusi Pendapatan di Indonesia*. *Jurnal Mahasiswa Unesa*, 2-16.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : PT Raja Graamedia Perkasa.
- Thomas. 2013. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Sebwang Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung*.
- Kuncoro, Mudrajat (2014). *Otonomi Daerah*, Edisi Ketiga, Yogyakarta : Penerbit Erlangga
- Inskeep, E. (1991). *Tourism Planning, and Integrated and Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Sari, I. M., & Abdullah, M. F. (2017). Analisis Ekonomi Kebijakan Dana Desa Terhadap Kemiskinan Desa di Kabupaten Tulungagung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 15(01).
- Dewi, M. H. U., Fandeli, C., & Baiquni, M. (2013). Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi Masyarakat Lokal di Desa Wisata Jatiluwih Tabanan, Bali. *Jurnal Kawistara*. <https://doi.org/10.22146/kawistara.3976>
- Widya, D. E., Adnan, M., & Manar, D. G. (2015). Pelaksanaan Pra dan Pasca Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Kertomulyo Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

---

**PERMOHONAN JUDUL PENELITIAN**

No. Agenda: 1844/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/12/11/2020

Kepada Yth.

Medan, 12/11/2020

**Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan**  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
di Medan

Dengan hormat.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Endita wahyu amieza  
NPM : 1605180034  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Komputer atau aplikasih pengolahan data

Dalam rangka proses penyusunan skripsi, saya bermohon untuk mengajukan judul penelitian berikut ini:

Identifikasi Masalah : Dana desa bagi sektor pariwisata mempengaruhi kondisi sosial dan ekonomi terutama bagi masyarakat di provinsi diy

Rencana Judul : 1. Analisa perkembangan indikator sosial provinsi diy pasca kebijakan dana otsus tahun 2018-2019  
2. Analisa dayatarik investasi provinsi yogyakarta dan pengembangan ekonomi pasca ekonomi  
3. Analisa perkembangan sektor ekonomi pariwisata pada wilayah provinsi daerah istimewa yogyakarta pasca kebijakan dana desa

Objek/Lokasi Penelitian : Provinsi istimewa yogyakarta

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya  
Pemohon

(Endita wahyu amieza)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3. Medan, Telp. 061-6624567, Kode Pos 20238

**PERSETUJUAN JUDUL PENELITIAN**

Nomor Agenda: 1844/JDL/SKR/AKT/FEB/UMSU/12/11/2020

Nama Mahasiswa : Endita wahyu amieza  
NPM : 1605180034  
Program Studi : Ekonomi Pembangunan  
Konsentrasi : Komputer atau aplikasih pengolahan data  
Tanggal Pengajuan Judul : 12/11/2020  
Nama Dosen pembimbing\*) : Prawidya Hariani RS  
Judul Disetujui\*\*) : Analisa Perkembangan sektor ekonomi Pariwisata  
Pada Wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta  
Pasca Kegiatan Dana Desa

Disahkan oleh:  
Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan

(Dr. Prawidya Hariani RS., SE., M.Si.)

Medan, .....

Dosen Pembimbing

(.....)

Keterangan:

\*) Diisi oleh Pimpinan Program Studi

\*\*) Diisi oleh Dosen Pembimbing

Setelah disahkan oleh Prodi dan Dosen pembimbing, scan/foto dan uploadlah lembaran ke-2 ini pada form online "Upload Pengesahan Judul Skripsi"



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No. 3 Tel. (061) 6624567 Ext: 304 Medan 220238



PENGESAHAN PROPOSAL

Berdasarkan hasil Seminar proposal Program Studi Manajemen yang diselenggarakan pada hari **Rabu, 21 April 2021** menerangkan bahwa:

Nama : ENDITA WAHYU AMIEZA  
N .P.M. : 1605180034  
Tempat / Tgl.Lahir : MEDAN, 7 AGUSTUS 1997  
Alamat Rumah : JL SEROJA KOMPLEK CITRA SEROJA C 14

Judul Proposal : ANALISA PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA  
PADA WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PASCA KEBIJAKAN DANA DESA

Proposal dinyatakan syah dan memenuhi Syarat untuk menulis Skripsi dengan

pembimbing : Dra.Prawidya Hariani RS,SE,M.Si

Medan, Rabu,18 November 2020

TIM SEMINAR

Ketua

Dr. PRAWIDYA HARIANI, RS,SE M.Si

Sekretaris

Dra.ROSWITA HAFNI, M.Si

Pembimbing

Dr. PRAWIDYA HARIANI, RS,SE M.Si

Pembanding

Dra. LAILAN SAFINA HSB, M.Si

Diketahui / Disetujui  
A.n. Dekan  
Wakil Dekan - I

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

**BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL**

Nama Lengkap : ENDITA WAHYU AMIEZA  
N.P.M : 1605180034  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Judul Proposal : ANALISA PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI PARIWISATA  
PADA WILAYAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA JOGJAKARTA  
PASCA KEBIJAKAN DANA DESA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Proposal	Paraf	Keterangan
01/10-20	Bab I revisi yg mmm masalah dan Tujuan Penelitian. Data: penduduk yg lebih banyak.		
06/10-20	Bab II yg Grand Thy hrs nyusun. Text Book Untuk siswa dgn rumus Rusca		
14/10-20	Bab II yg kanya penelitian di jurnal pd Tujuan Penelitian		
19/10-20	Bab III bgh yg harus diteliti kang yg bikin PROPOSAL yg bisa di pakej sebagai : Rudiher Lumen.		
26/10-20	Sumber Data : 10' lembaga yg Mau bnda Data		
11/11-20	Acc yg di sumbu !!		

Pembimbing Proposal

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS

Medan, November 2020  
Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**  
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : ENDITA WAHYU AMIEZA  
N.P.M : 1605180034  
Program Studi : EKONOMI PEMBANGUNAN  
Alamat Rumah : JL. SEROJA KOMP. CITRA SEROJA C14  
Judul Skripsi : ANALISA PERKEMBANGAN SEKTOR EKONOMI  
PARIWISATA PADA WILAYAH PROVINSI DAERAH  
ISTIMEWA YOGYAKARTA PASCA KEBIJAKAN DANA DESA

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
02/08-21	Bab I, II, III proposal ada revisi. Ulu tanyar di analisis dan rumusan masalah		
03/08-21	Bab IV ini hrs diarsah dari Gambaran Geografi, iklim + topografi serta Struktur Pemukiman dan Prose - Keb/Kota - Kecamatan - Desa		
09/08-21	Bab IV hrs mengahk Kendar Ekonomi dan Geografi dan Sosial di Prof. DIT.		
12/08-21	Analisis hrs saucan di rumusan masalah dan tujuan di Pemb an Skri dan juga tujuan di Pembinaan.		
15/10-21	Acc di Sides (Ujian muga nyan).		

Pembimbing Skripsi

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si

Medan, 15 Oktober 2021

Diketahui /Disetujui  
Ketua Program Studi  
Ekonomi Pembangunan

Dr. PRAWIDYA HARIANI RS, SE, M.Si